



PEKERJA DI IKN MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN GRATIS

BACA HALAMAN 2



KEJARI PANTAU PELABUHAN
PENDUKUNG PENGIRIMAN
MATERIAL DAN LOGISTIK IKN

BACA HALAMAN 9



ANTARA/NOVI ABDI

Pekerja sedang berkonsultasi dengan petugas kesehatan pada program pelayanan kesehatan gratis bertempat di Hunian Pekerja Konstruksi IKN, Kalimantan Timur, Kamis (17/8/2023).

LPM UI dan Kimia Farma Berikan Pelayanan Kesehatan Gratis bagi Pekerja di IKN

NUSANTARA - Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia (LPM UI) dan PT Kimia Farma (Persero) menyelenggarakan pelayanan kesehatan gratis bagi pekerja konstruksi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Menurut Direktur Pelayanan Dasar Otoritas IKN, Suwito, berdasarkan pemeriksaan kesehatan terhadap 1.500 pekerja konstruksi di IKN, pihaknya menemukan dua orang positif malaria. "Namun temuan ini masih harus kami dalam lagi melalui pemeriksaan mikroskopis untuk memastikan," kata dr Suwito di IKN, Kalimantan Timur, Kamis (17/8/2023).

Melihat sifat penyebaran penyakit malaria yang ditularkan nyamuk Anopheles, dan jika hasil pemeriksaannya positif, maka kemungkinan besar

kedua pekerja mengidap virus sebelum tiba di IKN.

"Ini juga kami sedang kami telusuri mengingat daerah yang ditempati IKN bukanlah tempat penyebaran malaria," kata dr. Suwito.

Selama dua hari yaitu Kamis-Jumat 17-18 Agustus sebanyak 3.000 orang pekerja konstruksi IKN mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis dari Otorita IKN bekerjasama dengan LPM UI dan Kimia Farma, serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan RI.

"Kami juga melibatkan puskesmas setempat yakni Puskesmas Samboja di Kutai Kartanegara dan Puskesmas Pena-

jam Paser Utara dalam melaksanakan pemeriksaan kesehatan," kata Ketua Panitia Pelayanan Kesehatan La Ode Abdul Rahman dari LPM UI di IKN. Kegiatan pemeriksaan kesehatan diselenggarakan di Ruang Serba Guna Hunian Pekerja Konstruksi IKN.

Suwito menambahkan kegiatan pelayanan kesehatan ini digelar untuk mendukung pembangunan IKN serta memastikan seluruh tenaga kerja dalam kondisi sehat, bugar, dan produktif, sehingga bisa bekerja maksimal.

Adapun pelayanan kesehatan yang diberikan antara lain pemeriksaan tekanan darah, hingga pemberian obat bila ada keluhan kesehatan, dan vitamin bila tak ada keluhan. **(Ant/MK)**



PENURUNAN BENDERA : Sekprov Kaltara H Suariansyah menjadi Inspektur upacara peringatan HUT ke-78 RI di Lapangan Agatish, Tanjung Selor, Kamis (17/8).

Sekprov Kaltara: 'Terus Melaju Untuk Indonesia Maju' Mendorong Pembangunan Benuanta

TANJUNG SELOR - Giliran Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Suariansyah, M.AP yang bertindak sebagai inspektur upacara penurunan Bendera Merah Putih dalam rangka peringatan HUT ke-78 Republik Indonesia (RI), Kamis (17/8/2023) sore.

Sebelumnya, bendera Merah Putih sukses dikibarkan oleh Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) di Lapangan Agatish, Tanjung Selor, Bulungan pada Kamis (17/8/2023) pagi.

Seperti diketahui, HUT ke-78 RI telah ditetapkan tema yakni 'Terus Melaju Untuk Indonesia Maju' yang memiliki makna mendalam sebagai gambaran pencapaian yang sukses diraih sehingga

posisi Indonesia menguntungkan dalam melanjutkan gerak pembangunan negara. Melalui tema tersebut, diharapkan dapat menjadi dorongan bagi bangsa Indonesia untuk terus bergerak maju.

"Terus Melaju Untuk Indonesia Maju, memiliki arti penting bagi perjalanan kemajuan pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Indonesia. Dari kemajuan ini, kita dapat terus melaju dan mengambil inspirasi dalam menghadapi tantangan di masa depan," jelas Sekprov Kaltara, Suariansyah dalam amanatnya.

Sekprov Suariansyah juga menyoroti pentingnya semangat 'NKRI harga mati', khususnya di daerah perbatasan.

"Sebagai bentuk dukungan bagi wilayah perbatasan, Gubernur hadir dalam upacara di Krayan. Krayan adalah salah satu contoh nyata kehadiran pemerintah untuk mendukung saudara-saudara kita di sana," katanya.

Sebagai akhir dari rangkaian acara, Sekprov Suariansyah berharap agar semangat membangun Tanah Benuanta yang Berubah, Maju, dan Sejahtera terus berkobar dalam hati masyarakat.

"Dengan semangat yang sama seperti semangat proklamasi, masyarakat di seluruh wilayah ini harus berkomitmen untuk terus melangkah maju dalam membangun Kaltara yang lebih baik," tutupnya. (dkisp)



ISTIMEWA

Jaringan Telkomsel sempat hilang di Nunukan dan Sebatik.

Begini Penjelasan Telkomsel Soal Jaringan Sempat Hilang di Nunukan dan Sebatik

NUNUKAN - Jaringan telekomunikasi milik provider Telkomsel dikabarkan sempat hilang beberapa hari lalu di wilayah Nunukan dan Sebatik.

Corporate Communications Telkomsel Regional Kalimantan, Arief Rachman Soeyitno menjelaskan, hilangnya jaringan tersebut dikarenakan adanya gangguan pada bagian perangkat transmisi.

"Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan pelanggan di wilayah Nunukan. Kami berterimakasih dan mengapresiasi atas kesetiiaannya menggunakan

layanan Telkomsel," ungkapnya, Jumat (18/8/2023).

Dia memaparkan, pada tanggal 13 terjadi gangguan pada perangkat transmisi, sedangkan untuk tanggal 14 gangguan di Pulau Sebatik diakibatkan putusnya kabel fiber optik.

"Semuanya saat ini sudah normal kembali. Kami dari Telkomsel selalu komitmen mengedepankan kenyamanan pengguna," tuturnya.

Arief menyebut, pihaknya selalu berupaya melakukan pengamanan jaring-

gan dengan menyiapkan monitoring sistem.

"Pemeliharaan secara berkala juga selalu kami lakukan, seperti mempersiapkan jalur back-up transmisi jika jalur transmisi utama mengalami kendala," katanya.

Kendati demikian, dirinya mengungkapkan bahwa jaringan Telkomsel saat ini hadir melayani wilayah Sebatik. "Secara keseluruhan, BTS Telkomsel sudah 4G," tandasnya. **(dez)**



ISTIMEWA

Pj Sekda Berau, Agus Wahyudi

Soal Kenaikan Gaji ASN, Sekda Berau: Harus Bersyukur dan Jadikan Motivasi Melayani Masyarakat Secara Maksimal

TANJUNG REDEB - Presiden Joko Widodo telah mengumumkan kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) yang meliputi PPPK, PNS serta TNI/Polri. Untuk diketahui, wacana kenaikan gaji itu disampaikan Presiden Jokowi saat mengajukan RUU APBN 2024 saat rapat paripurna, Rabu (16/8). Disampaikan Jokowi, gaji ASN, TNI/Polri akan naik 8 persen dan pensiunan 12 persen pada tahun 2024 mendatang.

Pj Sekda Berau, Agus Wahyudi mengatakan, kebijakan yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo itu membawa dampak positif ke daerah. Para ASN pun bergembira mendengar kabar tersebut.

Kegembiraan tersebut tentu bukan tanpa alasan, pasalnya dalam 10 tahun

terakhir kenaikan gaji itu baru terjadi dua kali.

"Semestinya kenaikan gaji terjadi kurang lebih dua tahun sekali. Selain mensejahterakan masyarakat, juga untuk mengimbangi inflasi," ungkapnya, Jumat (18/8/2023).

Di antaranya, alasan utama kenaikan gaji itu tentu untuk lebih dapat menyejahterakan para pegawai. Terlebih hal tersebut kebijakan nasional.

"Terkait anggaran pembiayaan, kenaikan gaji itu bersumber dari dana transfer pusat. Karena itu, dari sisi pembiayaan, kenaikan gaji tersebut tidak bermasalah bagi keuangan di daerah," jelasnya.

Lebih dari itu, kenaikan dan nominal

gaji yang dinaikan akan menjadi kewenangan pusat. Nominalnya juga hanya akan diketahui secara pasti jika sudah ada ketentuannya. Termasuk, sasaran kenaikan hanya untuk PNS atau juga bersama PPPK.

Terlepas dari berapa nominal yang akan diberikan, Agus secara khusus berpesan kepada para ASN agar bersyukur terhadap kenaikan gaji tersebut. Lebih dari itu, kenaikan gaji harus menjadi motivasi bagi ASN untuk bekerja secara serius dan maksimal.

"Berapapun kenaikan itu patut disyukuri. Dan tetaplah bersemangat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," tandasnya. **(dez)**



ANTARA/AJI CAKTI

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis Sumadilaga di Jakarta, Jumat (18/8/2023).

Proses Lelang Proyek Jalan Tol Akses IKN Bakal Rampung Bulan Ini

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan kontrak proyek Jalan Tol Akses IKN Nusantara Seksi 6A dan 6B yang dalam kondisi darurat berperan sebagai landasan (runway) pesawat siap ditandatangani pada Agustus 2023.

"Untuk Seksi Tol 6A dan 6B lelangnya sudah hampir selesai, kita harapkan penandatanganan kontraknya dapat ditandatangani pada Agustus ini," ujar Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga di Jakarta, Jumat (18/8/2023).

Danis mengatakan, Jalan Tol Seksi 6A dan 6B tersebut selain berfungsi sebagai jalan tol, juga dalam kondisi darurat dapat difungsikan sebagai landasan pesawat.

Proyek Tol Seksi 6A yakni Segmen Riko-Rencana Outer Ring Road IKN dan Seksi 6B Segmen Rencana Outer Ring Road-Simpang 3 ITCI.

Proyek pembangunan Jalan Tol Akses IKN Seksi 6A dan 6B tersebut masuk dalam gelombang (batch) pembangunan kedua IKN Nusantara.

Adapun tiga paket pekerjaan lainnya yang masuk dalam gelombang kedua pembangunan di IKN Nusantara yakni paket pembangunan sisi landasan udara Bandara very very important person (VVIP).

Lalu paket Jalan Akses Bandara VVIP, dan Jalan Tol Akses IKN Seksi 5B. Total nilai tiga paket pekerjaan tersebut mencapai Rp5,7 triliun.

Dalam kesempatan sama, Danis juga

mengungkapkan bahwa gelombang pembangunan pertama dari tahun 2020 sampai Maret 2023 yakni 39 paket total pagu terkontrak Rp24,16 triliun, progres fisiknya mencapai 40,01 persen.

Sedangkan gelombang pembangunan kedua periode setelah Maret 2023 sampai Maret 2023 yakni 39 paket dengan total nilai pagu terkontrak Rp30,53 triliun, progres fisiknya baru 0,10 persen.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, pembangunan sebagian Jalan Tol untuk mendukung akses ke IKN Nusantara merupakan bagian dari tahap pembangunan pertama periode 2022 - 2024. **(Ant/MK)**



ANTARA/HO - SATGAS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR IKN

Pembangunan infrastruktur multi-utility tunnel atau MUT di IKN Nusantara, Kalimantan Timur.

Inovasi Infrastruktur Jaringan Utilitas Terpadu di IKN Bisa Dicontoh Kota Lain

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) mengungkapkan inovasi infrastruktur Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) atau multi-utility tunnel (MUT) di IKN Nusantara dapat ditiru oleh kota-kota lainnya di Indonesia.

"MUT merupakan kebijakan pemerintah untuk membuat kegiatan di IKN lebih baik dan bisa dicontoh oleh kota-kota lainnya di Indonesia," ujar Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga di Jakarta, Jumat (18/8/2023).

Danis mengatakan bahwa MUT dibangun di bawah jalan utama dan dibagi menjadi tiga kompartemen. Pembangunan MUT di IKN ini juga disatukan dengan saluran drainase jalan. Setiap bagian kompartemen MUT tersebut memiliki tinggi sekitar 2,2 meter dan dapat dimasuki oleh dua orang dewasa.

Dengan demikian, pembangunan

MUT di IKN Nusantara bisa ditiru oleh kota-kota lainnya, karena jaringan kabel dan perpipaan bisa dipindahkan ke infrastruktur utilitas tersebut. Selain jaringan kabel dan perpipaan, MUT tersebut juga dilengkapi dengan jaringan gas.

"Intinya adalah bagaimana menjamin agar utilitas menjamin kenyamanan dan keamanan masyarakat seperti tidak ada lagi pengendara motor yang terjatuh kabel," kata Danis.

Hal ini tentunya menjadi standar pembangunan, karena tidak ada lagi pemasangan kabel di udara untuk IKN Nusantara atau tumpukan pipa di bawah tanah secara tidak rapih. MUT merupakan salah satu inovasi yang dibangun pemerintah untuk mewujudkan IKN sebagai kota modern.

MUT, kata Danis, merupakan investasi jangka panjang yang dapat memberikan kesempatan dalam melakukan penataan kota menjadi efektif dan efisien. Pembangunan MUT merupakan kebijakan pemerintah untuk membuat ke-

giatan di IKN lebih baik dan diharapkan bisa diikuti oleh kota-kota lainnya di Indonesia.

Pembangunan IKN sebagai ibu kota negara Indonesia dimulai dari nol, sehingga kebijakan-kebijakan pembangunannya disusun dan dimatangkan dengan baik, salah satunya adalah pembangunan MUT untuk utilitas.

"Semua desain pembangunan IKN prinsip-prinsipnya diatur dalam undang-undang dan peraturan," kata Danis.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, IKN yang dibangun adalah IKN harus merepresentasikan kota yang modern dengan standar internasional yakni progresif, inovatif, dan kompetitif dari segi teknologi, arsitektur, perencanaan kota, dan isu-isu sosial, serta dilengkapi dengan infrastruktur kelas dunia, dan terhubung dengan berbagai pusat kota lainnya di level global. **(Ant/MK)**



ANTARA/AJI CAKTI

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga (kanan) dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (18/8/2023).

Kontrak Pembangunan Rusun ASN di IKN Diteken Pekan Depan

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) mengungkapkan Proyek pekerjaan pembangunan 47 tower rumah susun atau rusun ASN di IKN Nusantara siap dilakukan penandatanganan kontrak pada pekan depan.

"Kontrak proyek pekerjaan 47 tower rusun Aparatur Sipil Negara (ASN) siap ditandatangani pada pekan depan," ujar Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga di Jakarta, Jumat (18/8/2023).

Danis juga menambahkan, pemenang kontrak proyek pekerjaan rusun ASN di IKN tersebut merupakan perusahaan dalam negeri mengingat skema pembiayaan proyek ini menggunakan APBN.

"Skema pembiayaan pembangunan rusun ASN di IKN menggunakan APBN,"

katanya.

Rusun hunian tersebut disesuaikan tingkatan ASN, semakin tinggi pangkat ASN rumah susun hunian bakal lebih luas dan paling kecil luas unit rumah susun hunian ASN sekitar 98 meter persegi, di mana masing-masing tower rata-rata dibangun 12 lantai.

Pembangunan rusun hunian untuk pegawai pemerintahan sesuai konsep kota mengelola dan menjaga ekosistem hutan, sehingga rumah susun dibangun dengan tidak banyak memotong hutan.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, inti dari pemindahan IKN ke Kalimantan adalah pemindahan pusat pemerintahan yang terdiri atas eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sehubungan dengan itu, pemindahan IKN tidak terlepas dari pemindahan aparatur sipil negara sebagai pegawai yang bekerja

di instansi pemerintah pusat.

Pemindahan IKN akan menjadi momentum reformasi birokrasi melalui upaya perbaikan tata kelola pemerintahan pada tingkat pusat yang efektif dan efisien melalui berbagai rencana sebagaimana tertuang pada uraian di bawah ini.

Pemerintah telah menyiapkan skenario pemindahan ASN kementerian dan lembaga negara secara bertahap ke IKN Nusantara yang dimulai pada tahun depan. Adapun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan serta beberapa kementerian/lembaga negara lainnya yang diproyeksikan untuk berangkat lebih awal dalam pemindahan ke IKN Nusantara. **(Ant/MK)**



ANTARA/NYAMAN BAGUS PURWANIWAN

Tongkang atau ponton bermuatan material di Pelabuhan Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yang ditetapkan sebagai salah satu pelabuhan khusus bongkar muat material dan logistik pembangunan Kota Nusantara

Kejari Penajam Pantau Pelabuhan Pendukung Pengiriman Material dan Logistik IKN

PENAJAM - Kejaksaan Negeri (Kejari) Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, memantau sejumlah pelabuhan di daerah berjuluk Benuo Taka itu, yang ditetapkan sebagai pendukung pengiriman material dan logistik pembangunan Kota Nusantara, sebagai ibu kota negara baru Indonesia.

"Kami melakukan inventarisasi dan identifikasi pelabuhan pendukung distribusi material dan logistik Ibu Kota Nusantara (IKN)," jelas Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara Abram Nami Putra Tambunan di Penajam, Jumat (18/8/2023).

Inventarisasi dan identifikasi sebagai tindak lanjut instruksi Kejaksaan Agung untuk mendukung kelancaran pengiriman material dan logistik pembangunan Kota Nusantara pada sebagian Kabupaten Penahan Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur.

Kementerian Perhubungan (Kemen-

hub) menerbitkan rekomendasi melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut menyangkut pemberian izin pengoperasian pemanfaatan garis pantai untuk kegiatan bongkar muat material dan logistik pembangunan Kota Nusantara jalur laut.

Sebanyak 14 pemegang izin penggunaan garis pantai untuk kegiatan pelabuhan bongkar muat material dan logistik khusus pembangunan ibu kota negara baru Indonesia tercatat di Kabupaten Penajam Paser Utara.

"Izin 14 pemegang garis pantai sudah diterbitkan Kemenhub untuk menggunakan garis pantai melakukan bongkar muat material dan logistik khusus IKN," katanya.

Izin penggunaan garis pantai yang dikeluarkan Kemenhub tersebut terlebih dahulu harus ada rekomendasi dari Kementerian PUPR dan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).

Kejaksaan negeri melakukan pantauan terhadap 14 pemegang izin penggu-

naan garis pantai, kata dia, karena izin yang diterbitkan Kemenhub itu hanya untuk kepentingan pengiriman material dan logistik pembangunan Kota Nusantara.

Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara bakal menindak tegas pemilik izin pelabuhan apabila terindikasi melayani bongkar muat selain untuk material dan logistik kebutuhan pembangunan ibu kota negara baru Indonesia.

"Izin pelabuhan hanya boleh melayani bongkar muat material dan logistik IKN, tidak boleh digunakan di luar kepentingan IKN dan kalau ditemukan digunakan bukan untuk IKN akan ditindak tegas," ujarnya.

Kejari Penajam Paser Utara juga memantau pelabuhan terhadap gangguan dari oknum tidak bertanggung jawab, persaingan usaha kurang sehat, serta mafia tanah dan pelabuhan, demikian Abram Nami Putra Tambunan. **(Ant/MK)**

Koran DIGITAL

SABTU, 19 AGUSTUS 2023



**PASANG IKLAN HUBUNGI
0811 5405 033**

Lebih Dekat dengan Satu Klik



TARGET AKHIR TAHUN TEMBUS 70 PERSEN

BACA HALAMAN 2-3



**OPERASI SATPOL-PP PPU
UNGKAP AKTIVITAS PSK DI
PENAJAM YANG TERPIKAT IKN**

BACA HALAMAN 31



Pembangunan IKN Batch 1 Capai 40 Persen, Target Akhir Tahun Tembus 70 Persen

JAKARTA - Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terus menunjukkan kemajuan signifikan. Per 10 Agustus 2023, progres fisik pembangunan IKN Batch 1 telah mencapai 40%, meningkat 2% dari minggu sebelumnya yang berada di angka 38%.

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, mengungkapkan bahwa timnya secara rutin memantau perkembangan pembangunan IKN setiap minggu.

"Dengan pertumbuhan rata-rata 2% setiap minggu, kami berharap progres pembangunan dapat mencapai 70% di akhir tahun," ujar Danis saat konferensi pers di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jakarta Selatan, Selasa (18/8/2023).



Beberapa proyek yang termasuk dalam Batch 1 antara lain Bendungan Sepaku Semoi di bidang sumber daya air yang hampir selesai, serta beberapa segmen jalan tol dengan progres yang beragam. Selain itu, proyek bangunan seperti Istana Negara, Kantor Presiden, dan Gedung Sekretariat Presiden juga menunjukkan kemajuan yang signifikan.

Namun, ada empat proyek yang mengalami keterlambatan dari target awal, salah satunya disebabkan oleh kendala dalam pengadaan tanah. Meski demikian, Danis optimistis bahwa semua proyek akan selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Untuk Batch 2, beberapa proyek besar seperti pembangunan Rusun Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tol Akses IKN Nusantara Seksi 6A dan 6B sedang dalam persiapan. Tol Akses IKN Nusantara nantinya akan memiliki fungsi ganda sebagai landasan pacu pesawat dalam situasi darurat. "Kami berharap semua proyek dapat selesai tepat waktu dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk memastikan pembangunan IKN Nusantara berjalan dengan lancar," pungkas Danis. **(MK)**

Editor: Agus Susanto



KOLONEL CZI EKO SUPRI SETIAWAN, S.SOS., M.HAN
DANDIM 0901/SAMARINDA

H. SYAHRIL SARAPING
KETUA HDCI KALTIM

26-27 AGUSTUS 2023
EX BANDARA TEMINDUNG SAMARINDA

DRAG BIKE & SAFETY RIDING

DOOR PRIZE !!!

Delivery + hold
NETFLIX

JALAN SANTAI

PRESENT BY :

SUPPORTED BY :

MEDIA PARTNER :

INFORMASI DAN PENDAFTARAN :

EZA : +62 822-5560-6039
MAULIDANI : +62 857-5134-4384
AYA : +62 831-4400-8571



PENURUNAN BENDERA : Sekprov Kaltara H Suariansyah menjadi Inspektur upacara peringatan HUT ke-78 RI di Lapangan Agatish, Tanjung Selor, Kamis (17/8).

Sekprov Kaltara: 'Terus Melaju Untuk Indonesia Maju' Mendorong Pembangunan Benuanta.

TANJUNG SELOR - Giliran Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Suariansyah, M.AP yang bertindak sebagai inspektur upacara penurunan Bendera Merah Putih dalam rangka peringatan HUT ke-78 Republik Indonesia (RI), Kamis (17/8/2023) sore.

Sebelumnya, bendera Merah Putih sukses dikibarkan oleh Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) di Lapangan Agatish, Tanjung Selor, Bulungan pada Kamis (17/8/2023) pagi.

Seperti diketahui, HUT ke-78 RI telah ditetapkan tema yakni 'Terus Melaju Untuk Indonesia Maju' yang memiliki makna mendalam sebagai gambaran pencapaian yang sukses diraih sehingga

posisi Indonesia menguntungkan dalam melanjutkan gerak pembangunan negara. Melalui tema tersebut, diharapkan dapat menjadi dorongan bagi bangsa Indonesia untuk terus bergerak maju.

"Terus Melaju Untuk Indonesia Maju, memiliki arti penting bagi perjalanan kemajuan pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Indonesia. Dari kemajuan ini, kita dapat terus melaju dan mengambil inspirasi dalam menghadapi tantangan di masa depan," jelas Sekprov Kaltara, Suariansyah dalam amanatnya.

Sekprov Suariansyah juga menyoroti pentingnya semangat 'NKRI harga mati', khususnya di daerah perbatasan.

"Sebagai bentuk dukungan bagi wilayah perbatasan, Gubernur hadir dalam upacara di Krayan. Krayan adalah salah satu contoh nyata kehadiran pemerintah untuk mendukung saudara-saudara kita di sana," katanya.

Sebagai akhir dari rangkaian acara, Sekprov Suariansyah berharap agar semangat membangun Tanah Benuanta yang Berubah, Maju, dan Sejahtera terus berkobar dalam hati masyarakat.

"Dengan semangat yang sama seperti semangat proklamasi, masyarakat di seluruh wilayah ini harus berkomitmen untuk terus melangkah maju dalam membangun Kaltara yang lebih baik," tutupnya. **(dkisp)**



ISTIMEWA

Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris menyayangkan masih banyak pengangguran di Bontang.

Tekan Angka Pengangguran, Agus Haris Sodorkan 2 Solusi

BONTANG - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Agus Haris menyoroti tingginya angka pengangguran di Kota Bontang Kalimantan Timur (Kaltim).

Dikatakannya, kondisi ini tidak semestinya terjadi. Mengingat Bontang merupakan pusat daerah industri dan tenaga di Indonesia.

"Berbagai zona industri semacam migas, petrokimia, dan pupuk sudah tumbuh di kota ini. Tapi sayangnya angka pengangguran masih tertinggi," ujarnya, Rabu (16/8/2023).

Salahsatu solusi yang ditawarkan Politisi Gerindra itu adalah meminta pemerintah lebih giat mengadakan program pelatihan dunia usaha atau industri, untuk meningkatkan skill atau

kemampuan masyarakat. Hal itu agar pengangguran bisa ditekan, lantaran masyarakat memiliki kemampuan yang dibutuhkan perusahaan.

"Sebaiknya buka pelatihan, kan ada APBD. Bisa menekan angka pengangguran," timpalnya.

Solusi berikutnya yang ia tawarkan adalah menggaet investor. Upaya ini perlu gencar dilakukan gencar mengingat beberapa tahun ke depan Bontang bakal mengalami pasca migas, yang mana perusahaan besar seperti Badak LNG akan berakhir masa operasinya pada tahun 2025. Begitupun Pupuk Kaltim, kini sedang melebarkan sayapnya ke Provinsi Papua. Kebutuhan bahan dasar gas menjadi sebab dibangunnya pabrik di sana.

"Pemkot harus memikirkan itu dari sekarang. Jangan sampai angka pengangguran semakin tinggi," terangnya.

Diketahui, Kota Bontang menjadi kota yang memiliki pengangguran terbuka terbanyak di Kaltim. Tingkat pengangguran di kota industri itu mencapai 7,81 persen. Sementara pengangguran paling kecil terdapat di Penajam Paser Utara (PPU) dengan persentase 2,12 persen.

Sementara, jumlah pencari kerja mulai Januari hingga Maret 2023 berjumlah 2.015 orang dengan lapangan pekerjaan hanya tersedia untuk 365 orang. Lowongan tersebut tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja di wilayah Kota Taman. **(adv/al)**



YUSVA ALAM

Rapat Paripurna ke-16 Masa Sidang III di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Jumat (18/8/2023).

Panasnya Rapat Paripurna: Ketua DPRD 'Semprot' Kadis Sering Mangkir Rapat Dewan

BONTANG – Rapat Paripurna ke-16 Masa Sidang III di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Jumat (18/8/2023) sore tadi berlangsung 'panas'. Anggota DPRD Bontang geram dengan OPD dan lurah yang sering mangkir saat ada panggilan rapat dari dewan.

Ungkapan kekecewaan tersebut awalnya disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD Bontang, Amir Tosina. Atos sapaan akrabnya mengeluhkan sering mengundang OPD terkait untuk menanyakan proses pekerjaan namun jarang yang hadir.

"Kurang lebih 5-6 kali kami mengundang tidak pernah hadir. Melalui rapat yang terhormat ini dapat kami tegaskan agar dapat menghargai kami sebagai Anggota DPRD. Kami ingin kerjasama yang baik," ujarnya.

Pernyataan tersebut lalu ditimpali oleh Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam. Andi Faiz pun 'menyemprot' para OPD yang hadir. Ia menegaskan kalau kedudukan Anggota DPRD dengan wali kota itu sejajar berdasarkan undang-undang.

"Tolong perlakuan kalian kepada pimpinan kalian itu juga perlakukan kepada kami. Berkali-kali kami mengundang rapat, OPD-OPD pun tidak pernah

datang," ungkapnya.

Ia mengatakan, kalau sampai kepala dinas terkait tidak datang pada saat pembahasan mitra kerja komisi masing-masing untuk pembahasan APBD perubahan, ia akan menyalahkan pemerintah kalau pembahasan ini gagal atau terlambat.

"Kita perlu kolaborasi dengan semua pihak. Waktu kita tidak banyak. Uang Rp 700 M mau dihabiskan di waktu 3 bulan itu saya tidak tau berapa banyak silpnya tahun depan. Kalau lepas tahapan-tahapan kita sekarang ini kalau cuma gara-gara itu sangat disayangkan," bebrnyanya.

Dirinya juga menyindir adanya 'lurah politis'. Kalau bertemu anggota dewan selalu bicara 'warna'. Menurutnya di pemerintahan ini bukan warna, bukan politik, tapi pelayanan kepada masyarakat.

Dikatakannya, serapan anggaran pemerintah daerah sampai hari ini di prognosis 6 bulan pertama hanya 30 persen. Masih ada 70 persen yang belum terserap di hampir semua OPD. Ditambah lagi Rp 300 Miliar di anggaran perubahan.

"Terbayang gak silpnya. Jangan cuma nafsu mau masukkan anggaran

tapi harus realistis," tegasnya.

Politisi Partai Golkar ini kembali mengingatkan jangan sampai hal tidak penting seperti ini mengganggu hubungan antara pemerintah dan DPRD. Agar hubungan keduanya lebih baik lagi ke depannya.

Sementara itu Wali Kota Bontang menanggapi keluhan tersebut. Menurutnya jangan sampai keluhan tersebut menggeneralisir semua OPD. Karena tidak semua OPD seperti itu. Jangan sampai satu dinas yang berlaku buruk dapat merusak yang lain.

"Tidak semua kepala dinas seperti itu," ujarnya.

"Saya akan panggil semuanya. Saya akan beri peringatan terkait hal itu. Saya akan tegur," tegasnya.

Basri pun juga mengingatkan kepada DPRD agar sistem penganggaran sekarang ini juga harus disikapi dengan baik. Artinya melalui semua tahapan-tahapan dari awal.

"Saya minta kepada DPRD dalam hal menyusun anggaran, kita harus sesuai aturan juga. Sama-sama kita mengatur. Jangan sampai anak buah saya diserahkan dalam hal ini. Kita semua punya forum. Saya juga punya forum," pungkasnya. (adv/al)



ISTIMEWA

Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid

DPRD Kukar Minta Pemprov Kaltim Segera Tindak Lanjuti Penanganan Longsor di Margasari

TENGGARONG - Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Abdul Rasid, ikut menyoroti musibah longsor di Dusun Margasari, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, yang sebabkan satu bangunan bengkel runtuh ke Sungai Mahakam. Pada Kamis (10/8/2023) lalu.

"Mungkin menindaklanjuti apa yang disampaikan masyarakat kepada kami, bahwa terjadinya musibah tanah longsor yang ada di Jembayan tentunya ini perlu menjadi perhatian kita bersama Pemerintah Kabupaten Kukar," ujar Rasid.

Diketahui, bencana tanah longsor tersebut posisinya tepat berada di samping Jalan Poros Tenggarong - Loa

Janan. Bahkan, menurut informasi yang didapat olehnya, tanah yang berada di bawah jalan utama yang menghubungkan Tenggarong - Loa Janan tersebut tanahnya berongga atau kosong.

"Kemarin kita sempat sidak kesana, memang disampaikan warga bahwa di bawah dari pada jalan itu pada saat dilakukan pengeboran kosong," ungkapnya.

Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, ia pun meminta agar dinas terkait yang ada di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dapat menindaklanjutinya.

"Mudah-mudahan dinas terkait yang ada di provinsi secepatnya menindaklan-

juti ini, supaya tidak terlalu banyak korban rumah yang ada disitu," sebutnya.

Pemerintah desa setempat juga diharapkan untuk berkoordinasi dengan Pemkab soal kondisi tanah usai terjadinya longsor tersebut. Sehingga, Pemkab Kukar bisa cepat mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi kejadian yang serupa.

"Kita koordinasikan dengan pemerintah daerah kalau memang benar disitu rawan longsor. Tentunya pemerintah daerah harus cepat mengambil tindakan, supaya tidak ada kejadian lagi yang seperti itu," pungkasnya. (adv/afi)



ANTARA/AJI CAKTI

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis Sumadilaga di Jakarta, Jumat (18/8/2023).

Proses Lelang Proyek Jalan Tol Akses IKN Bakal Rampung Bulan Ini

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan kontrak proyek Jalan Tol Akses IKN Nusantara Seksi 6A dan 6B yang dalam kondisi darurat berperan sebagai landasan (runway) pesawat siap ditandatangani pada Agustus 2023.

"Untuk Seksi Tol 6A dan 6B lelangnya sudah hampir selesai, kita harapkan penandatanganan kontraknya dapat ditandatangani pada Agustus ini," ujar Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga di Jakarta, Jumat (18/8/2023).

Danis mengatakan, Jalan Tol Seksi 6A dan 6B tersebut selain berfungsi sebagai jalan tol, juga dalam kondisi darurat dapat difungsikan sebagai landasan pesawat.

Proyek Tol Seksi 6A yakni Segmen

Riko-Rencana Outer Ring Road IKN dan Seksi 6B Segmen Rencana Outer Ring Road-Simpang 3 ITCI.

Proyek pembangunan Jalan Tol Akses IKN Seksi 6A dan 6B tersebut masuk dalam gelombang (batch) pembangunan kedua IKN Nusantara.

Adapun tiga paket pekerjaan lainnya yang masuk dalam gelombang kedua pembangunan di IKN Nusantara yakni paket pembangunan sisi landasan udara Bandara very very important person (VVIP).

Lalu paket Jalan Akses Bandara VVIP, dan Jalan Tol Akses IKN Seksi 5B. Total nilai tiga paket pekerjaan tersebut mencapai Rp5,7 triliun.

Dalam kesempatan sama, Danis juga mengungkapkan bahwa gelombang pembangunan pertama dari tahun

2020 sampai Maret 2023 yakni 39 paket total pagu terkontrak Rp24,16 triliun, progres fisiknya mencapai 40,01 persen.

Sedangkan gelombang pembangunan kedua periode setelah Maret 2023 sampai Maret 2023 yakni 39 paket dengan total nilai pagu terkontrak Rp30,53 triliun, progres fisiknya baru 0,10 persen.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, pembangunan sebagian Jalan Tol untuk mendukung akses ke IKN Nusantara merupakan bagian dari tahap pembangunan pertama periode 2022 - 2024. **(Ant/MK)**

*Pewarta : Suharsana Aji Sasra J C
Editor : Nurul Aulia Badar*



ANTARA/HO - SATGAS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR IKN

Pembangunan infrastruktur multi-utility tunnel atau MUT di IKN Nusantara, Kalimantan Timur.

Inovasi Infrastruktur Jaringan Utilitas Terpadu di IKN Bisa Dicontoh Kota Lain

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) mengungkapkan inovasi infrastruktur Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) atau multi-utility tunnel (MUT) di IKN Nusantara dapat ditiru oleh kota-kota lainnya di Indonesia.

"MUT merupakan kebijakan pemerintah untuk membuat kegiatan di IKN lebih baik dan bisa dicontoh oleh kota-kota lainnya di Indonesia," ujar Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga di Jakarta, Jumat (18/8/2023).

Danis mengatakan bahwa MUT dibangun di bawah jalan utama dan dibagi menjadi tiga kompartemen. Pembangunan MUT di IKN ini juga disatukan dengan saluran drainase jalan. Setiap bagian kompartemen MUT tersebut memiliki tinggi sekitar 2,2 meter dan dapat dimasuki oleh dua orang dewasa.

Dengan demikian, pembangunan MUT di IKN Nusantara bisa ditiru oleh

kota-kota lainnya, karena jaringan kabel dan perpipaan bisa dipindahkan ke infrastruktur utilitas tersebut. Selain jaringan kabel dan perpipaan, MUT tersebut juga dilengkapi dengan jaringan gas.

"Intinya adalah bagaimana menjamin agar utilitas menjamin kenyamanan dan keamanan masyarakat seperti tidak ada lagi pengendara motor yang terjatuh kabel," kata Danis.

Hal ini tentunya menjadi standar pembangunan, karena tidak ada lagi pemasangan kabel di udara untuk IKN Nusantara atau tumpukan pipa di bawah tanah secara tidak rapih. MUT merupakan salah satu inovasi yang dibangun pemerintah untuk mewujudkan IKN sebagai kota modern.

MUT, kata Danis, merupakan investasi jangka panjang yang dapat memberikan kesempatan dalam melakukan penataan kota menjadi efektif dan efisien. Pembangunan MUT merupakan kebijakan pemerintah untuk membuat kegiatan di IKN lebih baik dan diharapkan bisa diikuti oleh kota-kota lainnya di

Indonesia.

Pembangunan IKN sebagai ibu kota negara Indonesia dimulai dari nol, sehingga kebijakan-kebijakan pembangunannya disusun dan dimatangkan dengan baik, salah satunya adalah pembangunan MUT untuk utilitas.

"Semua desain pembangunan IKN prinsip-prinsipnya diatur dalam undang-undang dan peraturan," kata Danis.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, IKN yang dibangun adalah IKN harus merepresentasikan kota yang modern dengan standar internasional yakni progresif, inovatif, dan kompetitif dari segi teknologi, arsitektur, perencanaan kota, dan isu-isu sosial, serta dilengkapi dengan infrastruktur kelas dunia, dan terhubung dengan berbagai pusat kota lainnya di level global. **(Ant/MK)**

Pewartu : Suharsana Aji Sasra J C
Editor : Biqwanto Situmorang



ANTARA/NYAMAN BAGUS PURWANIWAN

Tongkang atau ponton bermuatan material di Pelabuhan Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yang ditetapkan sebagai salah satu pelabuhan khusus bongkar muat material dan logistik pembangunan Kota Nusantara.

Kejari Penajam Pantau Pelabuhan Pendukung Pengiriman Material dan Logistik IKN

PENAJAM - Kejaksaan Negeri (Kejari) Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, memantau sejumlah pelabuhan di daerah berjuluk Benuo Taka itu, yang ditetapkan sebagai pendukung pengiriman material dan logistik pembangunan Kota Nusantara, sebagai ibu kota negara baru Indonesia.

"Kami melakukan inventarisasi dan identifikasi pelabuhan pendukung distribusi material dan logistik Ibu Kota Nusantara (IKN)," jelas Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara Abram Nami Putra Tambunan di Penajam, Jumat (18/8/2023).

Inventarisasi dan identifikasi sebagai tindak lanjut instruksi Kejaksaan Agung untuk mendukung kelancaran pengiriman material dan logistik pembangunan Kota Nusantara pada sebagian Kabupaten Penahan Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur.

Kementerian Perhubungan (Kemhub) menerbitkan rekomendasi melalui

Direktur Jenderal Perhubungan Laut menyangkut pemberian izin pengoperasian pemanfaatan garis pantai untuk kegiatan bongkar muat material dan logistik pembangunan Kota Nusantara jalur laut.

Sebanyak 14 pemegang izin penggunaan garis pantai untuk kegiatan pelabuhan bongkar muat material dan logistik khusus pembangunan ibu kota negara baru Indonesia tercatat di Kabupaten Penajam Paser Utara.

"Izin 14 pemegang garis pantai sudah diterbitkan Kemhub untuk menggunakan garis pantai melakukan bongkar muat material dan logistik khusus IKN," katanya.

Izin penggunaan garis pantai yang dikeluarkan Kemhub tersebut terlebih dahulu harus ada rekomendasi dari Kementerian PUPR dan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).

Kejaksanaan negeri melakukan pantauan terhadap 14 pemegang izin penggunaan garis pantai, kata dia, karena izin yang diterbitkan Kemhub itu hanya

untuk kepentingan pengiriman material dan logistik pembangunan Kota Nusantara.

Kejaksanaan Negeri Penajam Paser Utara bakal menindak tegas pemilik izin pelabuhan apabila terindikasi melayani bongkar muat selain untuk material dan logistik kebutuhan pembangunan ibu kota negara baru Indonesia.

"Izin pelabuhan hanya boleh melayani bongkar muat material dan logistik IKN, tidak boleh digunakan di luar kepentingan IKN dan kalau ditemukan digunakan bukan untuk IKN akan ditindak tegas," ujarnya.

Kejari Penajam Paser Utara juga memantau pelabuhan terhadap gangguan dari oknum tidak bertanggung jawab, persaingan usaha kurang sehat, serta mafia tanah dan pelabuhan, demikian Abram Nami Putra Tambunan. **(Ant/MK)**

Oleh : Nyaman Bagus Purwaniawan

Editor : Guido Merung



ANTARA/ NOVI ABDI

Pekerja sedang berkonsultasi dengan petugas kesehatan pada program pelayanan kesehatan gratis bertempat di Hunian Pekerja Konstruksi IKN, Kalimantan Timur, Kamis (17/8/2023).

LPM UI dan Kimia Farma Berikan Pelayanan Kesehatan Gratis bagi Pekerja di IKN

NUSANTARA - Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia (LPM UI) dan PT Kimia Farma (Persero) menyelenggarakan pelayanan kesehatan gratis bagi pekerja konstruksi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Menurut Direktur Pelayanan Dasar Otoritas IKN, Suwito, berdasarkan pemeriksaan kesehatan terhadap 1.500 pekerja konstruksi di IKN, pihaknya menemukan dua orang positif malaria. "Namun temuan ini masih harus kami dalam lagi melalui pemeriksaan mikroskopis untuk memastikan," kata dr. Suwito di IKN, Kalimantan Timur, Kamis (17/8/2023).

Melihat sifat penyebaran penyakit malaria yang ditularkan nyamuk Anopheles, dan jika hasil pemeriksaannya positif, maka kemungkinan besar

kedua pekerja mengidap virus sebelum tiba di IKN.

"Ini juga kami sedang kami telusuri mengingat daerah yang ditempati IKN bukanlah tempat penyebaran malaria," kata dr. Suwito.

Selama dua hari yaitu Kamis-Jumat 17-18 Agustus sebanyak 3.000 orang pekerja konstruksi IKN mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis dari Otorita IKN bekerjasama dengan LPM UI dan Kimia Farma, serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan RI.

"Kami juga melibatkan puskesmas setempat yakni Puskesmas Sambaja di Kutai Kartanegara dan Puskesmas Penajam Paser Utara dalam melak-

sanakan pemeriksaan kesehatan," kata Ketua Panitia Pelayanan Kesehatan La Ode Abdul Rahman dari LPM UI di IKN. Kegiatan pemeriksaan kesehatan diselenggarakan di Ruang Serba Guna Hunian Pekerja Konstruksi IKN.

Suwito menambahkan kegiatan pelayanan kesehatan ini digelar untuk mendukung pembangunan IKN serta memastikan seluruh tenaga kerja dalam kondisi sehat, bugar, dan produktif, sehingga bisa bekerja maksimal.

Adapun pelayanan kesehatan yang diberikan antara lain pemeriksaan tekanan darah, hingga pemberian obat bila ada keluhan kesehatan, dan vitamin bila tak ada keluhan. **(Ant/MK)**

Pewarta : Novi Abdi

Editor : Ganet Dirgantara



ANTARA/AJI CAKTI

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga (kanan) dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (18/8/2023).

Kontrak Pembangunan Rusun ASN di IKN Diteken Pekan Depan

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) mengungkapkan Proyek pekerjaan pembangunan 47 tower rumah susun atau rusun ASN di IKN Nusantara siap dilakukan penandatanganan kontrak pada pekan depan.

"Kontrak proyek pekerjaan 47 tower rusun Aparatur Sipil Negara (ASN) siap ditandatangani pada pekan depan," ujar Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga di Jakarta, Jumat (18/8/2023).

Danis juga menambahkan, memenangkan kontrak proyek pekerjaan rusun ASN di IKN tersebut merupakan perusahaan dalam negeri mengingat skema pembiayaan proyek ini menggunakan APBN. "Skema pembiayaan pembangunan rusun ASN di IKN menggunakan APBN," katanya.

Rusun hunian tersebut disesuaikan tingkatan ASN, semakin tinggi pangkat ASN rumah susun hunian bakal lebih luas dan paling kecil luas unit rumah susun hunian ASN sekitar 98 meter persegi, di mana masing-masing tower rata-rata dibangun 12 lantai.

Pembangunan rusun hunian untuk pegawai pemerintahan sesuai konsep kota mengelola dan menjaga ekosistem hutan, sehingga rumah susun dibangun dengan tidak banyak memotong hutan.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, inti dari pemindahan IKN ke Kalimantan adalah pemindahan pusat pemerintahan yang terdiri atas eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sehubungan dengan itu, pemindahan IKN tidak terlepas dari pemindahan aparatur sipil negara sebagai pegawai yang bekerja di instansi pemerintah pusat.

Pemindahan IKN akan menjadi mo-

mentum reformasi birokrasi melalui upaya perbaikan tata kelola pemerintahan pada tingkat pusat yang efektif dan efisien melalui berbagai rencana sebagaimana tertuang pada uraian di bawah ini.

Pemerintah telah menyiapkan skenario pemindahan ASN kementerian dan lembaga negara secara bertahap ke IKN Nusantara yang dimulai pada tahun depan. Adapun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan serta beberapa kementerian/lembaga negara lainnya yang diproyeksikan untuk berangkat lebih awal dalam pemindahan ke IKN Nusantara. (Ant/MK)

Pewarta : Suharsana Aji Sasra J C

Editor : Adi Lazuardi

radar.
MEDIA
MEDIA KALTIM GROUP

www.radarbukota.com | www.radarkutim.com
www.radarkukar.com | www.samarinda.com
www.radarberau.com | www.radar.paser.com | www.radarballkpapan.com

INFO & PEMASANGAN IKLAN
CP. 0853 4894 3982



BEST TIME TROPHY DAN UANG PEMBINAAN TOTAL HADIAH RATUSAN JUTA RUPIAH



HADIAH UTAMA MOTOR MATIC

26-27 AGUSTUS 2023

SIRKUIT EX BANDARA TEMUNDUNG SAMARINDA

DRAG BIKE 201 M (KEJURPROV)

KELAS POINT

1. DB.1 - BRACKET 8 DETIK
2. DB.2 - BRACKET 9 DETIK
3. DB.3 - BRACKET 10 DETIK
4. DB.4 - SPORT 2 TAK TUNE UP FRAME STD 155 CC (POINT)

KELAS SUPPORTING

5. DB.5 - BEBEK 4 TAK TUNE UP 150 CC
6. DB.6 - MATIC BANGKA STD INDEKSI 200 CC
7. DB.7 - SPORT 4 TAK BANGKA STD NON DOHC 300 CC
8. DB.8 - MATIC TUNE UP 200 CC
9. DB.9 - BEBEK 2 TAK 150 CC
10. DB.10 - MATIC BANGKA STD 130 CC (MPF)
11. DB.11 - FFA 200 CC
12. DB.12 - BEBEK 4 TAK 150 CC
13. DB.13 - BEBEK 4 TAK 200 CC
14. DB.14 SUNMORI CBR BX RING
15. DB.15 SUNMORI BEBEK 2 TAK 150 CC
16. DB.16 SUNMORI BEBEK 2 TAK 125 CC NON BUILD UP
17. DB.17 SUNMORI BEBEK 2 TAK 130 CC
18. DB.18 SUNMORI SPORT 2 TAK 155 CC
19. DB.19 SUNMORI MATIC INDEKSI BANGKA STD 150 CC
20. DB.20 SUNMORI BEBEK 4/T BANGKA STD 110 CC
21. DB.21 SUNMORI SPORT 4T 150 CC

DRAG BIKE 402 M

22. DB.22 BIK MATIC 250 - 400 CC TOURING
23. DB.23 SPORT 150 - 400 CC TOURING
24. DB.24 FFA SPORT
25. DB.25 HARLEY NON TOURING SADDLE BAG
26. DB.26 HARLEY TOURING SADDLE BAG

REGISTRASI PESERTA

KELAS UTAMA

TANGGAL 05 - 15 AGUSTUS : 510 K
TANGGAL 16 - 25 AGUSTUS : 560 K

KELAS SUPPORTING

TANGGAL 05 - 15 AGUSTUS : 410 K
TANGGAL 16 - 25 AGUSTUS : 460 K

KELAS SUNMORI

TANGGAL 05 - 15 AGUSTUS : 360 K
TANGGAL 16 - 25 AGUSTUS : 410 K

LINK PENDAFTARAN :

[HTTPS://LINKTR.EE/
DNTIMINGPENDAFTARAN](https://linktr.ee/dntimingpendaftaran)

PRESENT BY :



SUPPORTED BY :



MEDIA PARTNER :



INFORMASI DAN PENDAFTARAN :

EZA : +62 822-5560-6039
MAULIDANI : +62 857-5134-4384

Koran DIGITAL

MEDIA KALTIM.com

Lebih Dekat dengan Satu Klik

MAU PASANG IKLAN MURAH DI KORAN?



HUBUNGI CP: 0811-5405-033



DANDIM CUP KEJURPROV SERI 3 2023

**BEST TIME
TROPHY
DAN UANG
PEMBINAAN**

**HADIAH
UTAMA
MOTOR
MATIC**



KOLONEL CZI EKO SUPRI SETIAWAN, S.SOS., M.HAN
DANDIM 0901/SAMARINDA

H. SYAHRIL SARAPING
KETUA IMI KALTIM

- SAFETY RIDING
- LOMBA DRAG BIKE
- TALKSHOW KEREN
- LOMBA MODERN DANCE
- LIVE MUSIC
- LOMBA 17 AGUSTUS
- LOMBA FASHION SHOW
- JALAN SANTAI
- KULNER UMKM

SAFETY RIDING & DRAG BIKE

26-27 AGUSTUS 2023
EX BANDARA TEMINDUNG SAMARINDA

JALAN SANTAI



**DOOR
PRIZE !!!**

PRESENT BY :



SUPPORTED BY :



MEDIA PARTNER :



INFORMASI DAN PENDAFTARAN :

EZA : +62 822-5560-6039
MAULIDANI : +62 857-5134-4384
AYA : +62 831-4400-8571

TOYOTA LET'S GO BEYOND

— Come join us for New Avanza and New Veloz @auto2000_bontang —

LET'S TEST DRIVE!

EZ Deal
Get Your Toyota, Upgrade Your Style

DAPATKAN UNDIAN TEST DRIVE

AUTO2000 BONTANG
Jl. Ngipen Kalamas No. 23A, Belimbing Sari, Bontang Barat Kota Bontang Kalimantan Timur

Scan QR CODE Test Drive Pada Aplikasi M-TOYOTA

DOWNLOAD APLIKASI M-TOYOTA

Urusan Toyota lebih mudah!

AUTO 2000
member of ASTRA

TOYOTA LET'S GO BEYOND

SPESIAL PROMO GANTI OLI MESIN
* TOYOTA MOTOR OIL

Khusus Taxi Online & Travel

GUARANTEE PALING HEMAT GUARANTEE

Informasi - Call/WA :
Adi S : 0822-5435-0088

Urusan Toyota lebih mudah!

AUTO 2000
member of ASTRA

Bontang

Soal Kenaikan Gaji ASN, Sekda Berau: Harus Bersyukur dan Jadikan Motivasi Melayani Masyarakat Secara Maksimal

TANJUNG REDEB - Presiden Joko Widodo telah mengumumkan kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) yang meliputi PPPK, PNS serta TNI/Polri. Untuk diketahui, wacana kenaikan gaji itu disampaikan Presiden Jokowi saat mengajukan RUU APBN 2024 saat rapat paripurna, Rabu (16/8). Disampaikan Jokowi, gaji ASN, TNI/Polri akan naik 8 persen dan pensiunan 12 persen pada tahun 2024 mendatang.

Pj Sekda Berau, Agus Wahyudi mengatakan, kebijakan yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo itu membawa dampak positif ke daerah. Para ASN pun bergembira mendengar kabar tersebut.

Kegembiraan tersebut tentu bukan tanpa alasan, pasalnya dalam 10 tahun terakhir kenaikan gaji itu baru terjadi dua kali.

"Semestinya kenaikan gaji terjadi kurang lebih dua tahun sekali. Selain mensejahterakan masyarakat, juga untuk mengimbangi inflasi," ungkapnya, Jumat (18/8/2023).

Dia menyebut, alasan utama kenaikan gaji itu tentu untuk lebih dapat menyejahterakan para pegawai. Terlebih hal tersebut kebijakan nasional.

"Terkait anggaran pembiayaan, kenaikan gaji itu bersumber dari dana transfer pusat. Karena itu, dari sisi pembiayaan, kenaikan gaji tersebut tidak bermasalah bagi keuangan di daerah," jelasnya.

Lebih dari itu, kenaikan dan nominal gaji yang dinaikan akan menjadi kewenangan pusat. Nominalnya juga hanya akan diketahui secara pasti jika sudah ada ketentuannya. Termasuk, sasaran kenaikan hanya untuk PNS atau juga bersama PPPK.

Terlepas dari berapa nominal yang akan diberikan, Agus secara khusus berpesan kepada para ASN agar bersyukur terhadap kenaikan gaji tersebut. Lebih dari itu, kenaikan gaji harus menjadi motivasi bagi ASN untuk bekerja secara serius dan maksimal.

"Berapapun kenaikan itu patut disyukuri. Dan tetaplah bersemangat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," tandasnya. **(dez)**



ISTIMEWA

Pj Sekda Berau, Agus Wahyudi

10
09
2023

REUNI
SMK PERTIWI
Angkatan 1997

HOTEL ZURICH BALIKPAPAN

Ada Game seru, Hiburan, Hadiah,
& Doorprize

Only
Rp. 50k

Konfirmasi kehadiran : Masnah 081252119669



Anggota Komisi I DPRD Berau, Rudi Mangunsong.

Rudi: Pemkab Harus Proaktif Tuntaskan Blankspot

TANJUNG REDEB - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, Rudi Mangunsong mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk terus aktif melakukan berbagai upaya penuntasan blankspot di Kabupaten Berau.

Dirinya juga mengapresiasi kunjungan Tim Kemenkopolhukam yang datang ke Berau belum lama ini, untuk membantu percepatan penanganan wilayah blankspot. Serta meninjau beberapa wilayah blankspot di Kecamatan Kelay.

Menurutnya, internet kini telah berubah, dari yang tadinya merupakan barang mahal yang hanya sebagian orang yang mampu mengakses. Sekarang telah mengakar di masyarakat sebagai kebutuhan dasar. Apalagi melalui internet berbagai hal bisa dilakukan mulai dari mencari ilmu, berniaga hingga bersosial.

"Sekarang zaman sudah berubah, internet jadi kebutuhan yang dicari. Misal Covid-19 kemarin, pembelajaran daring memerlukan internet. Itu bukti bahwa sekarang internet jadi barang yang dibutuhkan banyak orang," jelasnya, Jumat

(18/8/2023).

Sehingganya, dirinya meminta Pemkab Berau tidak berpuas diri. Dan tetap bergerak untuk mencari alternatif lainnya yang bisa mempercepat penghapusan blankspot di Berau.

Ketiadaan internet di beberapa wilayah di Berau cukup memberi dampak bagi pertumbuhan beberapa sektor di masyarakat. Misalnya, dengan internet, masyarakat bisa berniaga melalui toko daring, sedangkan mereka yang masih berada di wilayah blankspot akhirnya belum bisa menggapai itu.

"Dampak ke ekonomi misalnya, mereka bisa membuka toko daring yang segmen pasarnya mungkin tidak hanya Berau. Hal itu bisa dicapai dengan akses internet yang baik," jelasnya.

Rudi berharap, ketika blankspot mampu teratasi bisa memberikan keluasaan masyarakat yang tinggal hingga wisatawan yang datang. Sebab, hampir seluruh sendi kehidupan perlu akses internet yang baik.

"Artinya, kendala yang terjadi di kampung-kampung dipedalaman dengan

tidak ada akses internet sangat berpengaruh sekali dengan semua hal," ujarnya.

Meski dirinya juga mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Berau yang telah menyediakan layanan wifi gratis di beberapa titik. Namun, Rudi menilai itu belum maksimal. Dirinya juga menyarankan Pemkab Berau untuk bekerja sama dengan layanan provider dengan program-program yang saling menguntungkan.

"Kita sambut kunjungan tim kemarin dikomunikasikan untuk membangun, kalau perlu kita kerjasama untuk membangun," ucapnya.

Sebab, dirinya pernah membangun layanan provider melalui kerjasama Pemerintah Kabupaten Berau dengan layanan Provider di wilayah Segah, tepatnya di Kampung Long Ayan.

"Karena saya pernah bangun provider di Segah, kerjasama dengan provider kita sewa setahun nilainya sekian. Kita harap itu bisa dilirik," ujarnya. **(mnz/dez)**

Pewartu: Amnil Izza

Editor: Dezwan



Pelaku pencurian tabung gas 12 kg di salah satu cafe di Kota Balikpapan tertangkap kamera CCTV.

Di Hari Merdeka, Cafe di Balikpapan Dibobol Maling

BALIKPAPAN - Salah satu tempat tongkrongan atau cafe di Kota Balikpapan menjadi sasaran aksi kejahatan pencurian oleh orang tak dikenal pada Kamis (17/8/2023) sekitar pukul 10.30 WITA.

Slalu Coffee yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Klandasan Ilir, Balikpapan Kota dibobol maling. Pintunya dibongkar dan tabung gas 12 kg pun lenyap dibawa kabur pelaku yang terlihat dari rekaman CCTV.

Pemilik Slalu Coffee, Ajeng (21) baru menyadari bahwa warungnya telah dibobol saat hendak membuka toko pada sore harinya. Saat ia tiba di cafe, ia melihat bahwa pintu toko telah terbuka dan

tabung gas 12 kg telah hilang.

"Kita sadarnya itu sore kemarin pas mau buka, kok pintu itu sudah terbaring. Terus kita cek tabungnya itu sudah nggak ada," ujar Ajeng, Jumat (18/8/2023).

Ajeng kemudian memeriksa rekaman CCTV dan melihat bahwa seorang pria telah masuk ke dapur sekitar pukul 10.30 WITA. Memang pada saat kejadian, sekitar tempat usaha miliknya dalam kondisi sepi.

Lebih lanjut pria tersebut merusak kunci pintu dan masuk ke dapur Slalu Coffee. Ia kemudian mengambil tabung gas 12 kg dan melarikan diri mengenakan sepeda motor.

"Dia kayak tahu kalau di situ ada tabung gas, jadi mungkin udah dipantau dari lama. Jadi dia langsung masuk dapur," tambahnya.

Dirinya menambahkan, pelaku hanya mengambil tabung Elpiji saja. Ajeng menduga, pelaku merupakan spesialis pencurian tabung Elpiji. Atas kejadian ini, Ajeng pun berencana melaporkan ke pihak kepolisian.

"Nunggu bapak saya pulang kalau mau lapor polisi. Nunggu saran dari beliau," tutup Ajeng. **(bom)**

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari



Dirlantas tinjau penerbitan SIM bagi penyandang disabilitas tuna rungu di Polresta Balikpapan.

Kini Penyandang Disabilitas Tuna Rungu di Kaltim Bisa Punya SIM

BALIKPAPAN - Dirlantas Polda Kaltim, Kombes Pol Sonny Irawan memantau langsung proses penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi penyandang disabilitas tuna rungu di Satlantas Polresta Balikpapan, Jumat (18/8/2023).

Sonny mengatakan, penerbitan SIM bagi penyandang disabilitas tuna rungu ini merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam memberikan pelayanan yang ramah terhadap penyandang disabilitas dengan memberikan kemudahan saat melakukan pengurusan SIM.

"Kita bantu prosesnya tetap mempermudah, tapi tidak mengurangi kualitas kompetensi pengendara," ujarnya.

Sonny menjelaskan, dalam proses pelayanan SIM bagi penyandang disabilitas tuna rungu akan dilakukan pelayanan yang sama prosesnya dengan masyarakat pada umumnya. Hanya saja, petugas yang melayani mereka telah diberikan pelatihan bahasa isyarat beberapa hari sebelumnya, untuk bisa

berkomunikasi dengan para penyandang tuna rungu yang melakukan permohonan penerbitan SIM.

"Masing masing loket menggunakan bahasa isyarat mulai dari administrasi sampai proses pemotretan ujian teori sampe dengan ujian praktek," jelasnya.

Sonny menambahkan, penerbitan SIM bagi penyandang disabilitas khususnya tuna rungu ini selain sebagai bentuk komitmen polri, juga untuk memfasilitasi mereka (tuna rungu) yang telah berkendara selama beberapa tahun tanpa dilengkapi SIM.

Untuk itu, pihaknya pun melakukan pelayanan jemput bola dengan mengajak para tuna rungu untuk melengkapi SIM saat berkendara di jalan umum.

"Tadi ada yang sudah 5 tahun bahkan 9 tahun, paling sedikit 5 tahun, mereka (tuna rungu) belum memiliki SIM, nah ini kan sangat ironi sekali jadi kami dari jajaran Ditlantas Polda Kaltim sesuai dengan arahan bapak kapolri, yaitu pre-

sisi kita jemput bola," tambahnya.

Penerbitan SIM bagi tuna rungu ini juga, lanjut Sonny, merupakan inovasi atau terobosan yang dilakukan kepolisian dengan berkolaborasi dengan Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin) di Kaltim untuk menggandeng penyandang disabilitas tuna rungu di Kaltim agar dapat tertib berlalu lintas.

Penyandang tuna rungu yang telah mendapatkan SIM juga nantinya akan diberikan tanda berupa sticker pada kendaraannya. Agar, petugas yang menemukan pelanggaran lalulintas di jalan bisa mengetahui kondisi pengendara tersebut.

"Harapannya kami polri khususnya Ditlantas Polda Kaltim hadir memberikan pelayanan bagi masyarakat," tutupnya. **(bom)**

Penulis: Aprianto

Editor : Nicha Ratnasari



Pemusatan Latihan STQH Kaltim: Persiapan Menuju Prestasi di Tingkat Nasional.

Peserta STQH Kaltim Jalani Pemusatan Latihan Jelang STQH Nasional ke-27 di Jambi

BALIKPAPAN - Menjelang pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadist (STQH) Tingkat Nasional ke-27 yang akan diselenggarakan di Jambi, Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kaltim menggelar Training Center atau pemusatan latihan di UPT Asrama Haji, Balikpapan.

Pelatihan yang berlangsung selama lima hari, dari tanggal 17 hingga 22 Agustus 2023, diikuti 22 peserta yang akan bertanding dalam 11 golongan lomba pada STQH Nasional ke-27. Event nasional tersebut akan berlangsung dari tanggal 27 Oktober hingga 4 November mendatang.

Elbadiansyah, Ketua Panitia Penyelenggara, mengungkapkan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk mem-

persiapkan peserta agar dapat tampil optimal di ajang nasional.

Sementara Sri Wahyuni, selaku koordinator pelatih, menambahkan bahwa pelatihan ini diberikan oleh 8 pelatih lokal yang memiliki kualifikasi nasional dan 4 pelatih nasional dari luar provinsi. Beberapa pelatih memberikan materi secara langsung, sementara yang lain melalui metode daring.

Dalam pembukaan pelatihan, Abdul Kholiq, Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Kaltim, menekankan pentingnya peserta mematuhi aturan yang diberikan oleh panitia. Hal ini diharapkan dapat memaksimalkan hasil pelatihan sehingga peserta dapat meraih prestasi terbaik.

Pada hari kedua pelatihan, seluruh

panitia dan pelatih menekankan pentingnya disiplin dalam meraih prestasi. Jauhar Efendi, sebagai Wakil Penanggungjawab kegiatan Training Center, juga menyoroti pentingnya mental juara bagi para peserta.

Jauhar, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua III LPTQ Kaltim, menegaskan, bahwa tidak ada prestasi yang bisa diraih dengan cara santai. "Prestasi harus diraih dengan kerja keras, disiplin, dan terukur," tegasnya.

Dengan pelatihan intensif ini, diharapkan para peserta STQH Kaltim dapat tampil maksimal dan meraih prestasi terbaik di ajang nasional yang akan datang. (MJE)

Editor: Agus Susanto



RAFI/MEDIA KALTIM

Wakil Bupati Kukar, Rendy Solihin.

APBD Naik Rp 11,8 Triliun, Pemkab Kukar Fokus Konektivitas Antarwilayah dan Stunting

TENGGARONG - Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rendy Solihin, me-wanti-wanti seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menuntaskan realisasi belanja yang sudah ditetapkan hingga akhir tahun anggaran. Ini dilakukan mengingat nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar Perubahan yang meningkat hingga Rp 11,8 triliun.

Ini sesuai proyeksi APBD Perubahan Kukar 2023, yang belum lama ini ditetapkan bersama DPRD Kukar. Meningkat dari angka Rp 7,78 triliun menjadi Rp 11,8 triliun, atau naik sekitar Rp 4 triliun lebih.

"Semua OPD wajib memaksimalkan belanjanya, agar tidak Silpa. Supaya ketika sudah dianggarkan bisa segera

dibelanjakan, itu misi utama kita," ungkap Rendy, Kamis (17/8/2023) malam.

Tentunya dengan kenaikan nilai APBD Perubahan Kukar 2023 ini, ikut mengerek alokasi belanja untuk beberapa OPD. Di antaranya, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar, serta belanja pegawai. Di mana ada total 3 ribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang harus digaji.

Termasuk Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kukar dan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kukar. Yang memang memiliki tugas untuk menyediakan kebutuhan air bersih di beberapa kecamatan. Peningkatan konektivitas antar wilayah kecamatan dan desa yang memang masih jadi pri-

oritas Pemkab Kukar ditahun 2023 ini. Di samping pembangunan jalan desa dan lingkungan.

Belum lagi pekerjaan rumah Kukar dalam proses pengentasan kemiskinan ekstrem di Kukar. Di dalamnya juga terdapat pengentasan kemiskinan yang sama-sama menjadi program prioritas secara nasional.

"Setiap OPD juga menganggarkan sesuai wilayahnya masing-masing, untuk pengentasan kemiskinan dan stunting. Artinya anggaran stunting secara nasional itu jadi prioritas kita di (APBD) perubahan 2023 dan murni 2024," tutup Rendy. (afi)

Penulis: Muhammad Rafi'
Editor: Nicha Ratnasari



ISTIMEWA

Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, saat Press Conference Kukar Bersholawat dan Kukarland Festival 2023.

Pemkab Siapkan Kukar Bersholawat dan Kukarland Festival 2023, Undang 8 Artis Ibu Kota

TENGGARONG - Dua event besar dipastikan akan memeriahkan Road to Erau Adat Kutai dan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Kota Tenggara ke-241, pada September mendatang. Yakni Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) akan menyelenggarakan Kukar Bersholawat dan Kukarland Festival 2023.

Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin menjelaskan acara yang digarap bersama seluruh dunia usaha yang beroperasi di Kukar ini, akan terfokus di Halaman Kantor Bupati Kukar. Di mana Kukar Bersholawat akan diselenggarakan terlebih dahulu pada Jumat (8/9/2023) mendatang. Dipimpin langsung oleh pimpinan Majelis Sholawat Az-Zahir, Habib Ali Zainal Abidin atau kerap dikenal dengan Habib Bidin.

"Kukar bersholawat untuk membukakan sholawat di Kukar, bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah. Ini pertama kali dalam event besar, akan ada dua kali setahun ini," ujar Rendi, Kamis (17/8/2023) malam.

Agenda puncaknya, yakni Kukarland

Festival 2023 yang rencananya akan digelar di tempat yang sama, Halaman Kantor Bupati Kukar. Pada 22-23 September 2023 mendatang. Tak main-main, dipastikan sebanyak 8 grup band akan menghentak pecinta musik di Kukar, Kalimantan secara umum.

Di antaranya, Potret Band, Setia Band, Tipe-X, Soegi Bornean, Maliq & D'essentials, Guyon Waton, Club Dangdut Racundang grup musik dangdut legendaris Soneta Grup.

Tentunya ini tidak akan dikerjakan sendiri oleh Dinas Pariwisata (Dispar) Kukar, namun lebih kepada kolaborasi lintas OPD. Seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kukar, Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Setkab Kukar.

Hadirnya Kukarland Festival 2023 pun, diklaim orang nomor dua di Kukar itu, menjawab kerinduan warga Tenggara akan hadirnya festival dalam skala besar. Mengingat sejumlah kecamatan sudah melakukan hal serupa. Dan festival yang bertepatan dengan

Erau Adat Kutai dan HUT Kota Tenggara ke-241 ini, menjadi jawabannya.

Ini pun diklaim akan menjadi gelaran akbar di tahun 2023. Dengan menyajikan expo terbesar di Kukar. Menyediakan 100 tenant lebih selama dua hari pelaksanaan Kukarland Festival 2023. Dengan target penonton mencapai 100 ribu orang yang akan memenuhi Tenggara, selama dua hari pelaksanaan event.

Belum lagi sektor lainnya yang akan berdampak. Tidak hanya pelaku UMKM di Kukar saja yang akan menuai, namun sektor lain seperti perhotelan pun dipastikan akan merasakan dampak dari perhelatan Kukarland Festival 2023 nantinya.

"Akan ada puluhan miliar rupiah yang berputar di Kukar, sedikit banyak akan berdampak untuk perekonomian warga Kukar," tutupnya. (afi)

Penulis: Muhammad Rafi'
Editor : Nicha Ratnasari



Pelaku beserta barang bukti.

Tangkap Pengedar Narkoba di Paser, Polisi Amankan 0,5 Gram Sabu hingga Uang Tunai Rp 9,2 Juta

PASER - Seorang pria berinisial S (41) warga Desa Busui, Kecamatan Batu Sopang diamankan Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya (Satresnarkoba) Polres Paser atas kepemilikan sabu yang juga diduga merupakan pengedar di wilayah setempat.

Pria itu diamankan pada pukul 18.30 WITA, Rabu (16/8/2023) di kediamannya dengan barang bukti 1 paket sabu seberat 0,5 gram. Barang bukti tersebut didapati setelah petugas menggeledah rumah milik pelaku yang turut ditemukan barang bukti lainnya.

"Kami mengamankan pelaku di kediamannya. Namun yang kami temukan hanya 1 paket yang kami jadikan barang bukti," kata Kasatresnarkoba Polres Paser, AKP Suradi, saat ditemui di ruangannya, Jumat (18/8/2023).

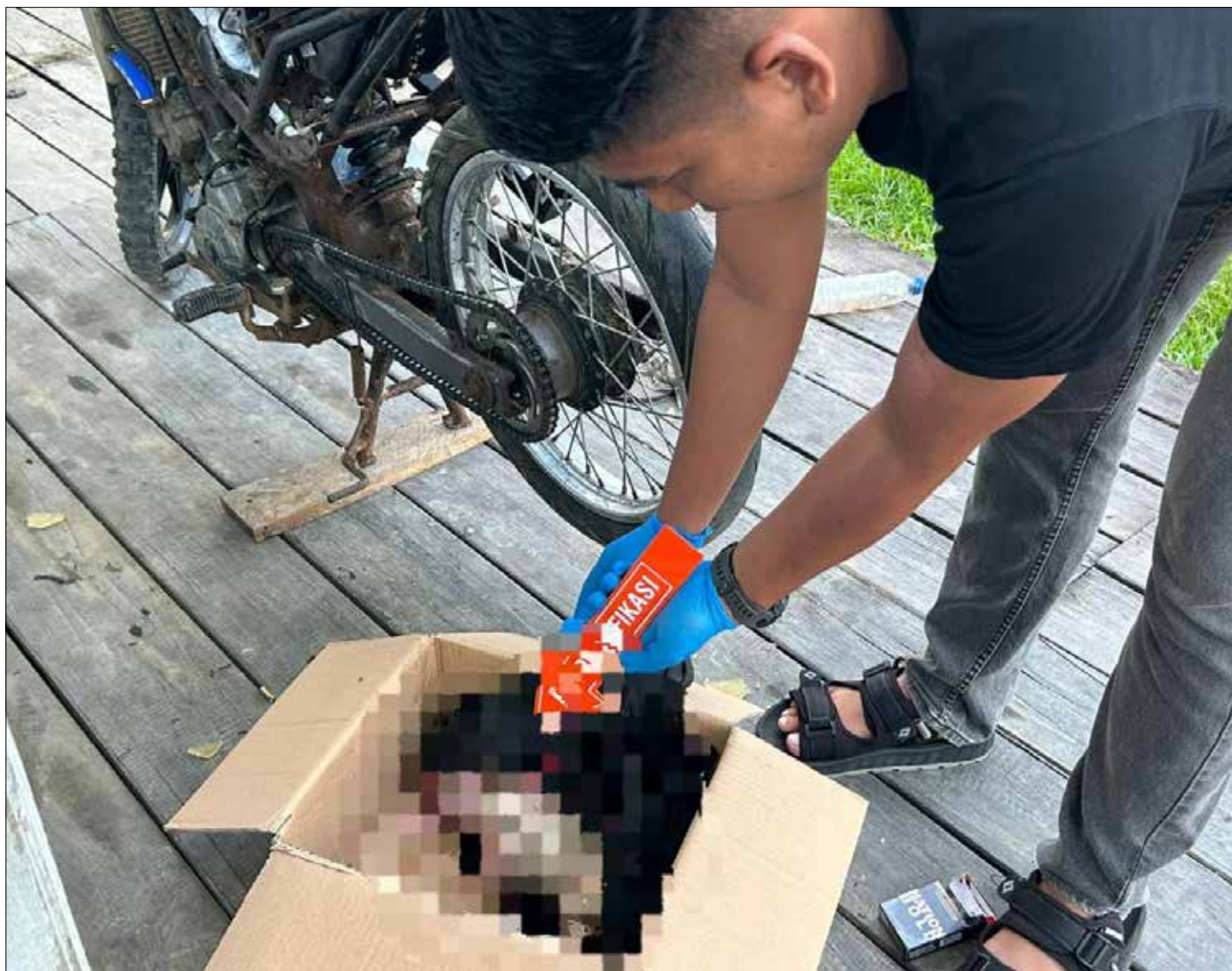
Adapun barang bukti lainnya yang diamankan petugas, yaitu 1 buah timbangan digital, 1 bundel plastik klip kosong, 1 buah sendok takar, 1 buah tas, 1 unit telepon genggam serta uang tunai senilai Rp 9,2 juta yang diduga hasil penjualan sabu.

"Kita temukan semuanya itu saat pengeledahan," lanjutnya.

Suradi menyebut, pengungkapan ini bermula dari informasi masyarakat yang mengetahui di rumah pelaku sering dilakukan transaksi narkoba. Pelaku lalu diringkus ke Polres Paser untuk diproses lebih lanjut.

Kini pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 112 juncto 114 Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Tersangka terancam hukuman kurungan penjara mulai dari 4 tahun hingga 20 tahun. (bs)

Pewartu : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari



Petugas Satreskrim Polres Paser saat di TKP

Jasad Bayi Laki-Laki Mengapung di Halte Sungai, Diduga Hasil Aborsi

PASER - Sosok jasad bayi baru lahir ditemukan seorang motoris perahu cepat berinisial M (31), di Halte Sungai Kandilo, Jalan Yos Sudarso, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, pada pukul 01.00 WITA dini hari, Kamis (17/8/2023).

Penemuan itu bermula, sesaat motoris hendak mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan membawa perahunya ke Desa Rantau Panjang dari Halte Sungai. Setibanya di perahu, M melihat bayi laki-laki yang tersangkut mengambang di ranting pohon dekat halte.

Awalnya, M menduga jasad bayi itu merupakan boneka biasa. Namun, saat diperhatikan kembali, dugaan yang ia kira tepat ternyata berbeda. Akibat terburu buru hendak mengisi BBM, ia berinisiatif membawa jasad itu ke rumah keluarga terdekatnya di Desa Rantau

Panjang.

"Jasad itu diangkat ke speedboat, ditaruh ke dalam kardus lalu ditutupi menggunakan bajunya dibawa ke rumah keluarganya," kata Kasatreskrim Polres Paser, Iptu Helmi Septi Saputro berdasarkan keterangan yang ia terima dari M.

Setibanya di kediaman keluarga M, petugas lalu menerima informasi dan mendatangi lokasi jasad saat itu yang sudah berada di Desa Rantau Panjang. Petugas langsung melarikan jasad tersebut ke RSUD Panglima Sebaya.

Dari upaya identifikasi yang dilakukan, petugas memperkirakan jasad bayi tersebut baru berusia 7 bulan dari dalam kandungan. Diduga, jasad tersebut hasil aborsi yang dilakukan oleh seseorang yang masih dicari tahu pelakunya.

"Karena belum kaku dan membiru

kemungkinan jasad itu baru dalam hitungan jam dibuang. Belum diketahui siapa orang tua dari jasad tersebut kami masih melakukan pendalaman," kata Helmi.

Saat ditemukan, telinga kiri bayi dalam kondisi rusak. Diduga hal itu disebabkan akibat gigitan ikan atau binatang air. Hingga kini, kondisi bayi tersebut kini ditempatkan di ruang jenazah RSUD Panglima Sebaya.

Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Kaltim untuk mengidentifikasi lebih dalam terhadap jasad tersebut. Sementara, bayi direncanakan akan dimakamkan di TPU Jone. (bs)

Penulis: Bhakti Sihombing
Editor: Nicha Ratnasari



Gubernur Kaltim Isran Noor

Simpang Siur Pj Gubernur Kaltim Rekomendasi DPRD Kaltim

SAMARINDA - Oktober 2023 mendatang, Isran Noor akan menanggalkan jabatannya sebagai Gubernur Kaltim karena telah berakhir masa jabatannya. Untuk mengisi kekosongan sesuai Undang-Undang Pilkada maka akan ditunjuk Pelaksana Jabatan (Pj) Gubernur.

Untuk menentukan siapa yang menjadi Pj Gubernur Kaltim, DPRD Kaltim mendapatkan amanah untuk memberikan rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Simpang siur siapa yang akan direkomendasikan "Karang Paci" masih berhembus di publik.

Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud, menerangkan saat ini DPRD Kaltim masih sebatas membahas secara internal siapa saja nama Pj Gubernur Kaltim yang akan diusulkan.

Kendati demikian, ia membenarkan bahwa ada lima nama yang menjadi pembahasan internal di DPRD Kaltim. Mereka adalah Rektor Universitas Mula-warman Prof. Ir. Abdunnur, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Prof.

Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, MA, Dirjen Otda Kemendagri, Dr. Akmal Malik, MSi, Deputy Otorita IKN Bidang Sosbud Alimuddin, hingga Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni.

Dalam beberapa kali kesempatan Hasan menegaskan, bahwa keinginan DPRD Kaltim adalah putra-putri daerah Kaltim yang menjabat sebagai Pj Gubernur. Akan tetapi syarat administrasi berupa eselonisasi dan pejabat struktural sesuai UU Pemilu, tetap menjadi pertimbangan utama Karang Paci.

"Sudah betul (lima nama calon Pj Gubernur), dan sudah dibahas di internal. Kalau mengikuti peraturan perundang-undangan mungkin ada beberapa nama yang seharusnya tidak masuk. Tapi demi untuk kesetaraan, keadilan sosial kami akan masukkan, sepanjang itu masih bisa 5 nama," jelas Politisi Golkar ini.

Ia menerangkan lebih lanjut, bahwa sesuai DPRD Kaltim masih menunggu petunjuk teknis dari Kemendagri terkait berapa nama yang harus dibawa oleh

Karang Paci.

"Jika ada petunjuk teknis harus 3 nama kita akan setorkan 3 nama. Kita menunggu karena belum ada perintah dari Kemendagri RI. Deadline ini kita belum dapat, itu kita tunggu saja," terangnya.

Sementara Gubernur Kaltim Isran Noor, turut angkat bicara terkait siapa yang akan menggantikannya dalam mengisi kekosongan jabatan KT 1. Ia berharap, tidak ada unsur politik dalam penentuan Pj Gubernur Kaltim.

Akan lebih elok sebutnya, siapa Pj Gubernur Kaltim adalah sosok yang dinilai mampu melanjutkan program kerja semasa kepemimpinan Isran-Hadi.

"Jangan bernuansa politis, tapi kepentingan program, itu saja. Program sudah ada, tinggal jalan. Mau dilanjut atau tidak. Hampir semua yang diprogramkan itu semua prioritas," tutup Isran. (eky)

Pewartu : Andi Desky

Editor : Nicha Ratnasari



Panggo masih terkulai lemas di Ruang Aster kamar 6 RSUD Abdul Wahab Sjahranie.

Warga Terlantar di Samarinda Menunggu Bantuan, Lembaga Sosial Diminta Bergerak

SAMARINDA - Seorang tukang parkir berusia 60 tahun, Panggo, ditemukan dalam kondisi lemah di area parkir pasar Segiri oleh Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al Hikmah. Menurut Ketua DKM Al Hikmah, Fakhruddin, hingga Rabu, 16 Agustus 2023, belum ada pihak yang memberikan bantuan.

Fakhruddin mengungkapkan kebingungannya, "Kami tidak tahu harus kemana meminta bantuan. Kami hanya bisa membelikannya pakaian dan Pampers karena dia tidak bisa bangun," katanya.

Sri, operator hotline Kemensos, menyarankan DKM Al Hikmah untuk menghubungi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) setempat. "Dinas Sosial setempat harus bergerak cepat.

Jika masalah tidak bisa diselesaikan di tingkat daerah, barulah diangkat ke tingkat nasional," jelas Sri.

Sri menambahkan bahwa jika masalah di daerah tidak terselesaikan, masyarakat bisa menghubungi hotline 171 untuk koordinasi lebih lanjut. "Kota Samarinda termasuk wilayah Solo, tetapi bisa dikoordinasikan dengan sentra terdekat," tambahnya.

Sri juga menekankan pentingnya peran Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) di tingkat desa/kelurahan. "IPSM harus berkoordinasi dengan TKSK di tingkat kecamatan," tegasnya.

Hermawan, staf keuangan RSUD AWS, mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada jaminan biaya pengobatan untuk Panggo. "Kami masih berupaya

mendapatkan bantuan dari yayasan," ujarnya.

Yuli Abdullah dari TKSK Samarinda Ulu mengatakan bahwa mereka telah turun tangan. "Dinsos kota Samarinda sudah mengajukan surat pembebasan biaya pengobatan untuk Panggo," kata Yuli.

Panggo saat ini dirawat di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda dan kondisinya mulai membaik. Darnawati Sarnawati dari IPSM kelurahan Air Hitam mengatakan pihaknya akan berkoordinasi untuk membantu biaya pengobatan Panggo yang tidak memiliki KTP atau BPJS dan tidak memiliki keluarga. (MK)



Zulkifli saat dibawa polisi ke RSJD Atma Husada.

Bakar Rumah Sendiri, Pria ODGJ Diamankan Polisi

SAMARINDA - Menjelang waktu istirahat di malam hari, tiba-tiba masyarakat dikejutkan adanya api yang berkobar di salah satu rumah di Jalan Kakap, Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir. Peristiwa itu terjadi pada Kamis (17/8/2023) sekitar pukul 20.30 wita.

Warga setempat pun akhirnya dibuat panik dan berhamburan ke luar rumah, mengingat lokasi kebakaran ini berada di wilayah pemukiman padat penduduk.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkar) Kota Samarinda, Hendra AH mengatakan bahwa kebakaran itu terjadi di bagian lantai dua rumah tersebut.

Beruntungnya, kata Hendra belum sempat api membakar habis rumah tersebut, petugas telah berhasil melakukan pemadaman.

"Asal api dari lantai dua rumah itu. Ada satu orang saja yang huni. Berun-

tung api cepat padam jadi tidak sampai menyebar ke rumah lain," ucap Hendra AH saat dikonfirmasi awak media, Jumat (18/8/2023).

Namun, ada yang janggal dalam peristiwa kebakaran itu. Setelah diselidiki, ternyata asal mula api dipicu oleh pemilik rumah yang sengaja membakar kediamannya sendiri.

Dugaan pembakaran rumah itu makin kuat, pasalnya saat kejadian warga juga sempat mengamankan seorang pria. "Penyebab pasti saat ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian," pungkasnya.

Dikfirmasi terkait kebenaran pembakaran rumah ini, Kapolresta Samarinda Kombes Pol Ary Fadli melalui Kapolsek Samarinda Kota, Kompol Tri Satria Firdaus juga turut membenarkan kejadian tersebut.

Bahkan, Kompol Tri juga mengungkapkan pihaknya telah mengamankan sang pemilik rumah pasca peristiwa itu.

Pria itu yakni bernama Zulkifli (48).

Meski diamankan polisi, pria berusia 48 tahun itu tak ditahan begitu saja. Lantaran, ia diduga merupakan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Alhasil, Zulkifli kemudian dibawa polisi menuju RSJD Atma Husada untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

"Sudah diserahkan ke RSJD Atma Husada. Jadi masih tunggu hasil pemeriksaan di RSJD untuk menentukan langkah selanjutnya," ungkapnya.

Dari data yang dihimpun, Zulkifli diduga memang sengaja membakar rumahnya sendiri. Belum diketahui apa yang membuat ia membakar rumahnya itu serta dengan apa pria berusia 48 tahun itu membakar kediamannya. Namun, akibat peristiwa itu lantai dua rumah tersebut ludes dilalap api. (vic)

Pewartu : Viqih Jati Kusuma
Editor : Nicha Ratnasari



Mantan Ketua Bawaslu Saiful

Banyak Wajah Baru di Bawaslu Kabupaten/Kota, Saiful: Banyak yang Mungkin Belum Paham Tugas

SAMARINDA – Mantan Ketua Bawaslu Kaltim Saiful, menyayangkan karena molornya pengumuman hasil seleksi Bawaslu Kabupaten /Kota dari Bawaslu RI yang baru diumumkan setelah empat hari kekosongan pimpinan Bawaslu Kabupaten/Kota, Jumat (18/8/2023).

“Drama soal molornya pengumuman hasil seleksi akhirnya keluar juga “tukasnya.

Saiful yang juga seorang Dosen Fisipol Unmul ini, mengungkapkan bahwa ini adalah preseden terburuk yang pernah terjadi dalam penetapan anggota Bawaslu Kabupaten/kota oleh Bawaslu pusat.

“Masa jabatan Bawaslu Kabupaten dan Kota untuk periode 2018-2023 kan telah berakhir pada 14 Agustus 2023 lalu, ini baru diumumkan tanggal 18

Agustus 2023, ada empat hari kekosongan padahal kita sudah masuk tahapan pemilu,” ujarnya.

Dia pun menyoroti banyaknya wajah-wajah baru yang terpilih menjadi anggota di tubuh Bawaslu Kabupaten/Kota saat ini.

“Memang nggak semua orang baru karena ada juga yang incumbent (orang lama), tapi kan cuma di beberapa kabupaten/kota ada hanya satu orang paling banyak dua orang,” ungkapnya.

Banyak hal yang diragukan Saiful dalam seleksi anggota Bawaslu ini. “Kan banyak wajah baru, tahapan pemilu udah berjalan, terus kemungkinan banyak yang belum faham tugas Bawaslu Kabupaten/Kota,” katanya.

Lebih jauh dia juga menerangkan bahwa setiap anggota yang terpilih

biasanya akan dilantik di Jakarta dan sekaligus diberikan pembekalan di sana, yang pastinya bisa membutuhkan waktu beberapa hari.

“Iya kan Bawaslu kan seharusnya sudah kerja. Kalau baru diumumkan begini artinya akan butuh waktu lagi dari pelantikan hingga ikuti pembekalan di sana,” ujarnya.

Walaupun demikian dia tetap berharap semoga anggota yang baru terpilih adalah orang yang benar-benar yang mampu menjalankan amanah.

“Semoga mampu menjalankan amanah,” tutupnya. (han)

Pewartu : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari

KPU Bontang Rilis Daftar Calon Sementara: 295 Caleg Lolos Verifikasi



Musdalifah, Anggota KPU Kota Bontang dari Divisi Teknis Penyelenggaraan

BONTANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bontang telah merilis Daftar Calon Sementara (DCS) untuk calon anggota DPRD Kota Bontang berdasarkan Daerah Pemilihan (Dapil). Pengumuman ini dilakukan pada Sabtu (19/8/2023) dan akan berlangsung hingga 23 Agustus 2023.

Musdalifah, Anggota KPU Kota Bontang dari Divisi Teknis Penyelenggaraan, menyampaikan bahwa dari total 369 calon yang mendaftar awalnya, hanya 295 Caleg yang berhasil memenuhi syarat setelah melalui proses perbaikan dan verifikasi. "Dari 369 calon yang mendaftar di awal, 295 Caleg telah memenuhi syarat dan masuk dalam DCS," ungkapnya saat diwawancarai oleh Mediakaltim.com.

Dari 18 partai politik yang berpartisipasi dalam Pemilu, Partai Bulan Bintang (PBB) tidak mendaftarkan Calegnya. Selain itu, Partai Garuda tidak melakukan perbaikan DCS, sehingga tidak ada Caleg dari partai tersebut yang terdaftar. "18 partai politik berpartisipasi, namun PBB tidak mendaftarkan Calegnya, dan Garuda tidak melakukan perbaikan DCS," jelas Musdalifah.

KPU Bontang telah mengumumkan DCS melalui situs resmi dan media sosial KPU Bontang. Musdalifah menambahkan bahwa masyarakat yang ingin memberikan tanggapan terhadap Caleg yang telah masuk DCS dapat mengunjungi situs KPU Bontang atau datang langsung ke kantor KPU Bontang.

"Masyarakat dapat memberikan tanggapan terhadap 295 nama Caleg yang ada, dan KPU akan melakukan klarifikasi kepada calon legislatif yang bersangkutan," tutup Musdalifah. **(yah)**

Pewartanya: Yahya Yabo.

Editor: Agus Susanto



LET'S GO BEYOND

BOOKING THS SAJA

BTS

di Digiroom



DAPATKAN GRATIS 1st OLI TMO SYNTETIC SETIAP SERVICE BERKALA*



THS Sama Lengkapnya Dengan Bengkel



Mekanik Professional | Memenuhi SOP Kesehatan
Part Original | Tanpa Biaya Kunjungan | Bergaransi

Kode Promo
BTSOLI

*Syarat dan ketentuan berlaku

Informasi - Call/WA :

Adi S : 0822-5435-0088



Urusan Toyota lebih mudah!



Bontang



ROBBI/MEDIAKALTIMGROUP

Bupati PPU, Hamdam Pongrewa saat diwawancarai Kamis (17/8/2023).

Kaltim Butuh Plt Gubernur dari Putra Daerah, Bupati PPU Hamdam Beber Alasannya

PPU-Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Hamdam Pongrewa, mengungkapkan harapannya agar putra-putri asli Kalimantan Timur (Kaltim) dapat mengisi posisi Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim yang akan menggantikan Isran Noor.

Menurutnya, banyak tokoh lokal yang memiliki kapabilitas untuk melanjutkan pembangunan di Bumi Etam. "Ada banyak tokoh-tokoh yang memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas ke gubernuran," kata Hamdam.

Beberapa nama lokal yang saat ini sedang dibahas di DPRD Kaltim untuk diusulkan antara lain: Rektor Universitas Mulawarman (Unmul) Abdunnur; Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Kamaruddin Amin; Dirjen Otda

Kemendagri, Akmal Malik; Deputi Otorita IKN Bidang Sosbud Alimuddin; Sekprov Kaltim, Sri Wahyuni; dan Staf Ahli di Kementerian Desa PDTT, M Nurdin.

"Semua nama tersebut adalah putra-putra terbaik Kaltim," ungkapnya.

Hamdam menjelaskan sepak terjang semua nama itu juga sudah diketahui publik. Seperti Alimuddin yang pernah menjabat sebagai pejabat Eselon II di PPU dan kini menjadi Deputi di Otorita IKN.

Sri Wahyuni yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Provinsi Kaltim. Sementara M Nurdin, mantan Sekretaris Bontang, juga memiliki rekam jejak yang baik di pemerintahan.

"Semua tokoh tersebut memiliki kual-

ifikasi yang baik. Mereka adalah putra terbaik bangsa, khususnya dari Kaltim," jelas Hamdam.

Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat. Hamdam berharap, apapun keputusannya nantinya, itu adalah yang terbaik untuk Kaltim.

"Keputusan akhir ada di tangan Bapak Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Kami percaya, siapapun yang dipilih nantinya adalah yang terbaik untuk Kaltim," pungkasnya. **(SBK)**

Pewartanya: Nur Robbi Sya'ian

Editor: Agus Susanto



ROBBI/MAEDIKALTIMGROUP

Tiga tersangka PSK saat diamankan di Mabes Satpol-PP PPU.

Operasi Satpol-PP PPU Ungkap Aktivitas PSK di Penajam yang Terpikat IKN

PPU - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Penajam Paser Utara (PPU) mengamankan tiga pekerja seks komersial (PSK) yang beroperasi di wilayah Penajam. Mereka mengaku berasal dari Balikpapan dan datang ke Benuo Taka, terpikat oleh daya tarik Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ketiga PSK yang diamankan berinisial NA (23), WR (25), dan DP (30) ditangkap saat sedang menjajakan jasa mereka melalui sebuah aplikasi pesan digital. Penangkapan dilakukan di salah satu hotel di Kecamatan Penajam pada Rabu (16/8/2023) malam.

Margono Hadi Susanto, Kepala Satpol-PP PPU, menyatakan bahwa pen-

angkapan ini dilakukan berdasarkan laporan dari warga yang resah dengan aktivitas ketiganya.

"Setelah menerima laporan dari masyarakat, kami segera merespons dan berhasil mengamankan ketiganya," ungkap Margono pada Kamis (17/8/2023).

Dari hasil pemeriksaan, ketiganya mengaku menjalankan aktivitas ini secara mandiri tanpa campur tangan muncikari. Mereka mengaku telah menjalankan profesi ini sejak Juli dengan tarif berkisar antara Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu. Margono menambahkan, "Mereka memilih PPU sebagai lokasi karena daya tarik IKN."

Ketiganya kini dihadapkan pada Per-

da Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial di PPU. Sebelum dipulangkan ke Balikpapan, mereka akan menjalani proses pembinaan. "Dinas Sosial PPU akan terlibat dalam proses pembinaan ini," jelas Margono.

Meskipun ketiganya mengaku bekerja secara mandiri, Satpol-PP PPU tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan jaringan prostitusi online. "Kami masih mendalami kasus ini, karena dugaan adanya muncikari yang terlibat," pungkas Margono. (SBK)

Perwarta: Nur Robbi Syai'an
Editor: Agus Susanto



DEDDY/RADARMEDIA

Pers Rilis Polres PPU.

Warga Penajam Ditangkap dengan 17 Paket Sabu Siap Edar, Terancam Hukuman Seumur Hidup

PPU - Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya (Saresnarkoba) Polres Penajam Paser Utara (PPU) berhasil mengamankan pria bernisial JD (29), warga Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, yang kedapatan memiliki 17 paket sabu siap edar.

Penangkapan dilakukan Rabu (16/8/2023) pukul 04.30 WITA di pinggir jalan RT07 Kelurahan Penajam. Saat digeledah, petugas menemukan 17 paket sabu yang terbungkus dengan lakban hitam dan tisu di dalam motor tersangka.

"Menurut pengakuannya, JD hanya

berperan sebagai kurir," kata Wakapolres Polres PPU, Kompol Bergas Hartoko, dalam konferensi pers pada Jumat (18/8/2023).

Selain sabu, petugas juga mengamankan barang bukti lain seperti 1 plastik klip, 1 bungkus rokok, 1 sepeda motor, 1 unit alat komunikasi, dan uang tunai sebesar Rp 1 juta. "Semua barang bukti kita amankan untuk pengembangan lebih lanjut," tambah Bergas.

Penangkapan ini dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai adanya aktivitas penyalahgunaan narkotika di daerah tersebut.

Berdasarkan informasi tersebut, Saresnarkoba PPU bergerak cepat ke lokasi dan berhasil mengidentifikasi serta menangkap pelaku yang sesuai dengan ciri-ciri yang dilaporkan.

JD kini harus menghadapi hukum dan dijerat dengan pasal 114 Ayat (1) atau pasal 112 Ayat (1) UU RI NO 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Ancaman hukumannya adalah pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 5 tahun dan paling lama 12 tahun, serta denda minimal Rp 1 miliar hingga maksimal Rp 10 miliar. **(NRD)**



ROBBI/MEDIAKALTIMGROUP

Ketua DPRD PPU, Syahrudin M Noor saat diwawancarai, Kamis (17/8/2023).

Ketua DPRD Syahrudin: Pj Gubernur Kaltim Harus Dukung Pembangunan PPU dan IKN

PPU - Menyongsong pengisian jabatan Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim yang akan menggantikan Isran Noor pada Oktober 2023, Ketua DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Syahrudin M Noor, menekankan pentingnya pemahaman terhadap wilayah lokal Kaltim.

Hal ini dianggap krusial untuk melanjutkan pembangunan yang tengah berjalan. "Kami berharap ada sosok yang memahami wilayah lokal Kaltim. Mengingat periode Pj ini merupakan transisi yang cukup panjang, tahapan pembangunan harus dapat berjalan dengan lancar," kata Syahrudin.

Selain pemahaman terhadap wilayah, Syahrudin juga menyoroti pentingnya dukungan pembangunan di kabupaten/kota di Kaltim, terutama PPU. Ter-

lebih dengan rencana pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang memerlukan biaya besar.

"Harapannya, kabupaten ini mendapatkan kontribusi yang signifikan, terutama dengan kehadiran ibu kota negara yang memerlukan anggaran besar. Hal ini harus dipahami oleh Pj yang akan datang," jelasnya.

Syahrudin menambahkan bahwa pemahaman terhadap wilayah dan kebijakan pembangunan tidak hanya dimiliki oleh sosok lokal. Oleh karena itu, keputusan mengenai siapa yang akan menjadi Pj Gubernur Kaltim sepenuhnya diserahkan kepada regulasi dan keputusan pemerintah pusat.

"Siapa pun yang memenuhi kriteria dan sesuai dengan aturan protap bisa

menjadi Pj Gubernur. Yang terpenting adalah pemahaman terhadap wilayah dan kebijakan pembangunan," tuturnya.

Diketahui, saat ini isu pengisi Pj Gubernur Kaltim menjadi perbincangan hangat. Beberapa nama lokal juga telah muncul dan dibahas di DPRD Kaltim sebagai calon yang akan diusulkan.

"Orang-orang yang muncul sebagai calon adalah yang terbaik di Kaltim. Siapa pun yang terpilih nantinya, pasti merupakan sosok yang terbaik," pungkask Syahrudin. (SBK)

Pewartu: Nur Robbi Syai'an

Editor: Agus Susanto



Resmi Diumumkan, Berikut Daftar Anggota Bawaslu Kabupaten Kota Se-Kaltim Terpilih Periode 2023-2028

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia telah mengumumkan daftar calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota terpilih untuk masa jabatan 2023-2028. Pengumuman ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Setelah melalui proses penilaian berdasarkan Hasil Uji Kelayakan dan Kepastian, Bawaslu mengumumkan calon anggota terpilih dari beberapa provinsi, termasuk Provinsi Aceh, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat.

Dari Provinsi Kalimantan Timur, berikut daftar kabupaten dan kota yang memiliki calon anggota Bawaslu terpilih sesuai pengumuman Nomor: 2570.1/KP.01.00/K1/08/2023 yang ditandatangani Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja tertanggal 18 Agustus 2023.

1. Kabupaten Berau:
- Ira Kencana

- Natalis Lapang Wada
- Tamjidillah Noor
2. Kabupaten Kutai Barat:

- Lourensus
- Silvester Sagor
- Tabita

3. Kabupaten Kutai Kartanegara:

- Fahrizal
- Hardianda
- Munir Anshory
- Sri Muliati Ningsih
- Teguh Wibowo

4. Kabupaten Kutai Timur:

- Agustinus Verdi Logo
- Aji Mashyudi
- Aswadi
- Maya Sari
- Musbah Ilham

5. Kabupaten Mahakam Ulu:

- Indra Parda Manurung
- Leonder Awang Ajaat
- Saaludin

6. Kabupaten Paser:

- Fauzan
- Firman
- Nur Khamid

7. Kabupaten Penajam Paser Utara:

- Edwin Irawan
- Moh Khazin
- Rusmansyah

8. Kota Balikpapan:

- Agus Sudirman
- Ahmadi Azis
- Dedi Irawan
- Hamrin
- Wasanti

9. Kota Bontang:

- Aldy Artrian
- Ismail Usman
- Syahriah

10. Kota Samarinda:

- Abdul Muin
- Imam Sutanto
- Padlansyah
- Sugeng Prasetyo
- Tumenggung Udayana

Para calon anggota tersebut akan mengikuti proses pengangkatan dan pelantikan dengan menggunakan pakaian adat/daerah masing-masing di Jakarta. Rencananya pelantikan akan dilaksanakan, Sabtu, 19 Agustus 2023. (MK)

Lahan Lumbung Pangan Diklaim Sudah Kantongi Izin KLHK

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Budisatrio Djiwandono menegaskan bahwa lahan yang digunakan untuk lumbung pangan atau food estate merupakan lahan yang sudah mengantongi izin Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Dalam hal lahan lumbung pangan yang ada di Kalimantan Tengah adalah izin yang namanya KHKP, kawasan hutan untuk ketahanan pangan. Memang izin yang pertama dan sudah keluar dari Kementerian LHK, pasti sudah ada kajiannya," tegas Budisatrio di Gedung DPR RI pada Rabu (16/8/2023).

Menurutnya, hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) nomor 24 tahun 2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate.

Selain itu, program Food Estate juga merupakan program strategis nasional dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional. Sehingga, lanjut dia, program ini sudah dijalankan dan patut didukung bersama-sama ke depannya untuk menjawab tantangan ketahanan pangan nasional.

"Meningkatkan situasi dunia geopolitik ekonomi internasional yang serba tidak menentu. Kita lihat bagaimana gejala ini sangat mempengaruhi produktivitas lahan-lahan pertanian dalam negeri, rasanya kita perlu inisiatif-inisiatif gagasan untuk mewujudkan ketahanan pangan. Salah satu solusinya adalah food estate atau lumbung pangan ini," ungkapnya.

Sementara itu, Juru Bicara Pemenangan Pemilu Partai Gerindra ini juga sekaligus menjawab tuduhan dari pihak-pihak yang mengatakan ini akan menjadi kerusakan lingkungan.

"Perlu diketahui bahwa lahan yang berada di Kalimantan Tengah seluas 6.000-an hektar dulunya adalah hutan produksi yang sudah lama tidak beraktivitas atau terbengkalai. Oleh sebab itu, Pak Prabowo berusaha untuk mewujudkan lumbung pangan untuk cadangan strategis dalam hal ini komoditas singkong sangat penting untuk lahan yang sudah disiapkan," ujar Budisatrio.

Memang diakui, setelah melakukan proses evaluasi ditemukan adanya beberapa lahan yang membutuhkan tindakan khusus karena lahan tersebut merupakan eks hutan produksi.

"Jadi memang memerlukan treatment-treatment khusus yang dalam tanda kutip mengubah lahan yang tidak produktif menjadi lahan yang produktif dengan komoditas singkong. Kenapa singkong? Singkong selain dapat menjadi sumber makanan tapi juga bisa menjadi sumber energi," pungkasnya. (cha)



Jawab Tudingan PDIP, Budisatrio : Food Estate Program Pak Jokowi

JAKARTA - Guna menepis tuduhan PDI Perjuangan (PDIP) terkait food estate dianggap sebagai bentuk kejahatan lingkungan, Partai Gerindra selalu berkomunikasi dengan pihak PDIP.

"Saya rasa kita komunikasi terus, kebetulan saya juga di Komisi IV. Ada juga teman-teman PDIP," terang Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Budisatrio Djiwandono kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (16/8/2023) lalu.

Menurutnya, program food estate ini sepatutnya didukung oleh seluruh pihak termasuk PDIP. Pasalnya, program strategis nasional untuk menjaga ketahanan pangan ini merupakan program yang digagas oleh Presiden RI, Joko

Widodo.

"Ini kan juga program pemerintah, program Pak Jokowi, di mana PDIP yang teman kita berada di kabinet. Jadi ke depannya, kita harus sama-sama sukseskan program ini, karena ini adalah masalah yang paling mendasar bagi Masyarakat Indonesia, ini masalah perut, masalah hak masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pangan," tegas Budisatrio.

Tak hanya itu, Budisatrio juga mengungkapkan bahwa sudah menjadi tugas pemerintah untuk menghadirkan dan memberikan bahan pangan yang berkecukupan untuk rakyat Indonesia.

"Untuk anak cucu kita. Untuk itu kita

terus berkomunikasi dan bersatu, kita harus sukseskan food estate ini," pungkasnya.

Diketahui, sebelumnya PDI Perjuangan (PDI-P) mengkritik program food estate atau lumbung pangan yang digarap pemerintah sebagai proyek kejahatan lingkungan.

Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto yang merujuk adanya penyalahgunaan pengembangan lumbung pangan. Menurutnya, politik seharusnya merawat kehidupan dan menjaga Bumi Pertiwi. Namun, dalam konteks proyek lumbung pangan, justru terjadi penyalahgunaan misalnya, penebangan hutan hingga habis. (cha)

MKP MEDIA KALTIM PROMOSINDO



RAMAIKAN
& IKUTI
EVENT
NYA
YUK

DAFTAR PAKAI
KUPON
DIGITAL
GRATIS

ACARA PUNCAK HUT MEDIA KALTIM :

27 AGUSTUS 2023

JALAN SEHAT

LAPANGAN EX. TEMINDUNG SAMARINDA
MULAI PUKUL 06.00 WITA

INFORMASI :
+62 821-5783-0863
05348943982

